

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

**(Studi Implementasi Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan
Di Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MOHAMMAD SABILILLAH
135030501111003**



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

MOTTO

*Jangan Menunggu Sukses baru
Bersyukur. Tapi Bersyukurlah,
Maka Bertambah Kesuksesanmu*

*Hidup Bahagia Itu Tentang
Bagaimana Cara Kita Bersyukur
dan Mensyukuri Atas Semuanya.*

(Mohammad Sabilillah, 2017)

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk Ayah
M.Zainuri, Ibu tersayang Siti Fatimah,
Mbah Chayanah, Kakak Zohana dan
Lidyah, Tante-tante dari keluarga kandung,
dan Temen-temen Kicau Mania Lamongan
Mereka adalah Segalanya Bagiku, Mereka
adalah Semangatku yang selalu
Membuatku Kuat Untuk Terus Melangkah.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Implementasi Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir
Berlangganan Di Kabupaten Lamongan)

Disusun Oleh : Mohammad Sabilillah

NIM : 135030501111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Pemenritahan

Malang, 30 Oktober 2017

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Bambang Santoso Haryono, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

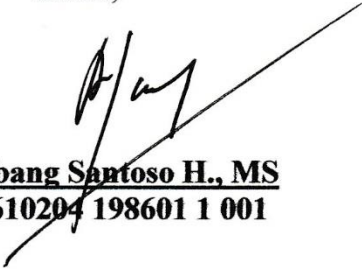
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Desember 2017
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Mohammad Sabilillah
Judul : Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Implementasi PERDA Nomor 15 Tahun 2010 Tentang parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,


Dr. Bambang Santoso H., MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota,

Anggota,


Dr. Tjahjanulin Domai., MS
NIP. 19531222 198010 1 001


Dr. Rer. Pol. Romy Hermawan, S.Sos, MAP
NIP. 19740725 200604 1 001

PERYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 1 Oktober 2017



Mohammad Sabilillah
NIM. 135030501111003

RINGKASAN

Mohammad Sabilillah, 2017. **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Implementasi Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan)** Dr. Bambang Santoso Haryono, MS 175 Hal + xvi

Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan merupakan upaya untuk mencapai tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan dan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan perolehan retribusi parkir, sehingga hal tersebut perlu digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah.

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian meliputi (1) Teori Edward III (komunikasi, sumberdaya, disposition, dan struktur birokrasi); dan (2) faktor penghambat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan telah mengalami peningkatan retribusi parkir hingga Rp 6.135.960.000. (1) a. komunikasi yang terjalin antara Dishub Kab. Lamongan, Satlantas Polres Lamongan, Samsat Lamongan, para petugas jukir serta masyarakat Lamongan berjalan kurang maksimal; b. Pemilihan SDM melibatkan peran dan fungsi dari para tenaga kontrak yang bertugas di 89 titik parkir serta adanya sumberdaya anggaran yang secara keseluruhannya bersumber dari APBD Lamongan; c. Komitmen Dishub Lamongan dalam mengatasi permasalahan di lapangan seperti adanya pungutan liar dapat diselesaikan tetapi kurang maksimal serta masyarakat berkomitmen untuk menegakkan penyimpangan sesuai peraturan yang berlaku; d. Struktur birokrasi sudah tertata rapi sesuai dengan SOP; (2) Faktor penghambat yakni keterbatasan jumlah SDM pada Dishub Kabupaten Lamongan serta Kurangnya kontrol dari Dinas Perhubungan terhadap para Petugas Juru Parkir.

Saran dari penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan perlu melibatkan peran dari masyarakat dalam melakukan kontrol. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kontak saran atau membuka layanan pengaduan yang dapat diakses melalui nomor hp dan aplikasi pesan online (*LINE* atau *WA*) sebagai sarana penyampaian keluhan dari implementasi kebijakan parkir berlangganan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Parkir Berlangganan, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SUMMARY

Mohammad Sabilillah, 2017. **The Implementation Of The Parking Subscription Policy To Increase The Income of The Local Revenue (The Study An Implementation Of Regulation No. 15 of 2010 About Parking Subscription In Kabupaten Lamongan)** Dr. Bambang Santoso Haryono, MS. 175 page + xvi

The subscription parking policy in the lamongan based on the districts lamongan regulation number 15 of 2010 about parking subscription is an effort to reach a goal related to smooth traffic roads and efforts to improve local revenue (PAD). An increase in the number of motor vehicles not comparable by the acquisition parking retribution, so that the thing necessary to uncover maximally by local governments.

Research methods which used was descriptive study with qualitative approach. The focus of research are (1) Edward III theory (communication, resources, disposition, and structure of bureaucracy); and (2) obstacle factors. Collection data techniques which used was interviews, observation and documentation. Data analysis is using Miles, Huberman and Saldana.

The research results that the implementation of the parking subscription policy in kabupaten lamongan have experienced an increase in charges for parking up to Rp. 6.135.960.000. (1) a. communication of Dishub Kab. Lamongan, Satlantas Polres Lamongan, Samsat Lamongan, as well as the parking officers and the society are working for less utmost extent; b. election involving the role of human resources and functions of the contract workers who work in parking 89 points and the existence of budget resources that is even all of it sourced from APBD Lamongan; c. commitment of Dishub Kab. Lamongan for the ability to handle every problem in the field such as the existence of illegal charges can be completed but less than maximum as well as the committed to enforce deviation in accordance with the regulation; d. bureaucratic structure had been ordered neat in accordance with SOP; (2) namely the limited number of factors which hinder human resources on Dishub Kab. Lamongan as well as a lack of control the parking officers.

Advice of this research is the Dishub Kab. Lamongan can involve the role of the society in check. This can be done with make contact suggestion or opening the complaints that can be accessed in phone call and chat applications (LINE or WA) as a means of complaints implementation of parking subscription policy

Keywords: Implementation, Policy, Subscription Parking, Original Income Regional (PAD)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Implementasi Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan) yang diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya .
4. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku Dosen Pembimbing atas segala kesabaran, nasihat, arahan dan bimbingannya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk kemudian hari.
6. Para staff dan Karyawan Pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu proses awal hingga akhir.
7. Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dishub Kabupaten Lamongan, Bapak Toyibatul Af'al kepala UPT Pengujian Dishub kabupaten Lamongan, Bapak Tony Ariantoro, SAP. MM selaku Kasi Manajemen Rekayasa dan Lalu lintas Dishub Kabupaten Lamongan, Ibu Suryani Indarti, SE selaku kasubag Umum Dishub Kabupaten Lamongan, Mas Zenda sebagai kontrol

jukir di lapangan Dishub Kabupaten Lamongan yang selalu memberikan motivasi dan arahan didalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak-bapak Jukir Binaan Dishub Kabupaten Lamongan yang sudah membantu saya untuk menjawab wawancara waktu dilapangan dalam memperlancar pengerjaan skripsi saya
9. Sahabat kontrakan (Anang, Baron, Dito, Fathan, Fahmi, Koko) yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman Gomes, Iqbal, Andra, Zaka, Devta, Indah, Anis, Reza, Yudho, Isma, Nirta dia adalah Teman Satu angkatan Administrasi Pemerintahan tahun 2013 yang selalu mendorong dan menyemangati agar skripsi cepat selesai
11. Sahabat Kicau Mania Lamongan (Saputra, Sugeng, Kemal, Broden, dan Team KPK-LA Bird Family) yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 31 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Kebijakan Publik	14
1. Konsep Kebijakan Publik	14
2. Elemen Kebijakan Publik	15
3. Ciri-ciri Kebijakan Publik	16
4. Tujuan Kebijakan Publik	17
5. Proses Perumusan Kebijakan Publik	18
6. Proses Pengambilan Kebijakan Publik	19
B. Implementasi Kebijakan Publik	20
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	20
2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Publik	23
3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik	24
4. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik	33
5. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan Publik.....	35
6. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik	37
7. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik	38
8. Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan	38
C. Otonomi Daerah	40
1. Hakikat Otonomi Daerah	40
2. Tujuan Otonomi Daerah	41
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	42
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	42

2. Keuangan Daerah	42
3. Pemungutan	43
E. Retribusi Daerah	44
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	44
2. Objek dan Golongan Retribusi	45
3. Retribusi Parkir.....	47
F. Parkir.....	49
1. Definisi Parkir	49
2. Fasilitas Parkir.....	50
3. Kebijakan Parkir.....	51
4. Pajak Parkir	52
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir	52
6. Objek dan Subjek Pajak Parkir.....	52
7. Bagi Hasil Pajak dan biaya pemungutan pajak parkir.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Fokus Penelitian	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Instrumen Penelitian	65
G. Analisis Data	66
H. Keabsahan Data.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	72
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	82
B. Penyajian Data	87
1. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	87
a. Komunikasi.....	95
b. Sumberdaya	104
1.1 Sumberdaya Manusia.....	105
1.2 Sumberdaya Anggaran.....	110
c. Disposisi	113
d. Struktur Birokrasi	119
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan parkir berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan	124
a. Keterbatasan Jumlah SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	124
b. Kurangnya Kontrol dari Dinas Perhubungan terhadap para Petugas Juru Parkir	128
C. Analisis Data	130

1. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	130
a. Komunikasi	139
b. Sumberdaya	145
1.1 Sumberdaya Manusia	146
1.2 Sumberdaya Anggaran	149
c. Disposisi	151
d. Struktur Birokrasi	154
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan parkir berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan	157
a. Keterbatasan Jumlah SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	157
b. Kurangnya Kontrol dari Dinas Perhubungan terhadap para Petugas Juru Parkir	160
BAB V PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 1987 sampai 2013	2
2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dari tahun 2012 - 2016	81
3	Kondisi Tata Guna Tanah Kabupaten Lamongan	82
4	Target Retribusi Parkir (sebelum dan sesudah pelaksanaan parkir berlangganan) Mulai Tahun 2004 s/d Agustus 2013	92
5.	Jumlah Pegawai Dishub dan Petugas Parkir Lamongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	105
6.	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017.....	125

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Tiga elemen sistem kebijakan publik	16
2	Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	67
3	Peta Kabupaten Lamongan	76
4	Lambang Kabupaten Lamongan	77
5	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	87
6	Pemasangan Spanduk dan Banner tentang Parkir berbayar oleh Petugas Dishub dan Satlantas Polres Lamongan	98
7	Kegiatan Sosialisasi Bagi Petugas Jukir maupun SKPD di Kabupaten Lamongan	103
8	Kegiatan Sosialisasi Bagi Petugas Jukir dan Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	107
9	Penertiban petugas parkir yang melakukan pungutan di Jalan KH. Hasyim Asyahi oleh Pegawai Dishub Kabupaten Lamongan	117
10	Struktur Organisasi Dishub dalam Mengimplementasikan Kebijakan Parkir Berlangganan	119
11	Pungutan Liar yang dilakukan oleh Juru Parkir	121

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1	Surat Riset
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian
4	Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, aktivitas kehidupan manusia sehari-hari tidak bisa lepas dari transportasi. Kesibukan yang menuntut setiap individu untuk berpindah dari satu posisi tempat ketempat yang lain membutuhkan kendaraan untuk mempercepat dan memudahkan aktivitas mereka. Alat transportasi di era globalisasi ini semakin beragam, namun kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, bus, dan truk menjadi transportasi yang digandrungi banyak orang untuk kebutuhan transportasi darat. Kendaraan bermotor dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan mobilitas pribadi hingga kebutuhan mobilitas distribusi dari suatu industri atau perusahaan.

Dilihat dari sisi mobilitas industri, kendaraan bermotor sangat berguna dalam pengangkutan sejumlah besar barang untuk mobilitas barang dari satu tempat ketempat yang lain. Sedangkan jika dilihat dari mobilitas pribadi, kebanyakan orang menggunakan sepeda motor dan mobil. Semakin tingginya mobilitas tingkat penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi baik dilingkup pribadi maupun industri, maka kebutuhan akan kepemilikan kendaraan bermotor pun semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya kepemilikan kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula jumlah kendaraan bermotor yang berkendara dijalanan yang jumlahnya mencapai jutaan unit. Jumlah peningkatan yang terjadi dari tahun ketahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tahun 1987
sampai 2013**

Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1987	1 170 103	303 378	953 694	5 554 305	7 981 480
1988	1 073 106	385 731	892 651	5 419 531	7 771 019
1989	1 182 253	434 903	952 391	5 722 291	8 291 838
1990	1 313 210	468 550	1 024 296	6 082 966	8 889 022
1991	1 494 607	504 720	1 087 940	6 494 871	9 582 138
1992	1 590 750	539 943	1 126 262	6 941 000	10 197 955
1993	1 700 454	568 490	1 160 539	7 355 114	10 784 597
1994	1 890 340	651 608	1 251 986	8 134 903	11 928 837
1995	2 107 299	688 525	1 336 177	9 076 831	13 208 832
1996	2 409 088	595 419	1 434 783	10 090 805	14 530 095
1997	2 639 523	611 402	1 548 397	11 735 797	16 535 119
1998	2 769 375	626 680	1 586 721	12 628 991	17 611 767
1999	2 897 803	644 667	1 628 531	13 053 148	18 224 149
2000	3 038 913	666 280	1 707 134	13 563 017	18 975 344
2001	3 189 319	680 550	1 777 293	15 275 073	20 922 235
2002	3 403 433	714 222	1 865 398	17 002 130	22 985 183
2003	3 792 510	798 079	2 047 022	19 976 376	26 613 987
2004	4 231 901	933 251	2 315 781	23 061 021	30 541 954
2005	5 076 230	1 110 255	2 875 116	28 531 831	37 623 432
2006	6 035 291	1 350 047	3 398 956	32 528 758	43 313 052
2007	6 877 229	1 736 087	4 234 236	41 955 128	54 802 680
2008	7 489 852	2 059 187	4 452 343	47 683 681	61 685 063
2009	7 910 407	2 160 973	4 498 171	52 767 093	67 336 644
2010	8 891 041	2 250 109	4 687 789	61 078 188	76 907 127
2011	9 548 866	2 254 406	4 958 738	68 839 341	85 601 351
2012	10 432 259	2 273 821	5 286 061	76 381 183	94 373 324
2013	11 484 514	2 286 309	5 615 494	84 732 652	104 118 969

Sumber: BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413>)

Hal ini mengakibatkan kondisi jalan raya semakin penuh dengan kendaraan baik kendaraan bergerak maupun kendaraan yang diparkir. Setiap pengguna kendaraan membutuhkan parkir ketika mereka sampai ketempat tujuan.

Meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya juga sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir. Hal ini berarti bahwa kendaraan yang menyediakan jasa parkir tiap tahunnya akan semakin meningkat. Kegiatan parkir ini biasa dilakukan ditepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan untuk menaruh kendaraan yang diparkir.

Jika kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum semakin banyak tiap tahunnya bisa dikatakan bahwa badan jalan semakin banyak digunakan untuk kegiatan parkir. Tiap pengguna jasa parkir akan dikenakan biaya parkir, keuntungan dari jasa parkir ini juga akan semakin meningkat seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang jumlahnya semakin meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan akan banyak berdampak bagi lalu lintas dan juga berdampak bagi pemasukan pemerintah. Diluar dari pemasukan daerah, pemerintah juga semakin ditantang dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya meningkat dalam bentuk pembuatan kebijakan yang inovatif dan juga pelayanan yang baik dalam menyediakan lahan parkir. Berdasarkan kenyataan ini, maka pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik guna menciptakan pelayanan dan kebijakan publik yang baik bagi masyarakat.

Sejak disahkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia telah menjalankan otonomi daerah, sehingga setiap daerah berhak dan berwenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam membuat peraturan, kebijakan dan implementasinya.

Diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 maka peraturan pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk PERDA (Peraturan Daerah) sebagai kebijakan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di suatu daerah. Otonomi daerah ini pemerintah dituntut untuk semakin inovatif dalam membuat kebijakan publik. Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dimana alasan kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992:2-4 dalam Sahya, 2014:35). Ini berarti bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah harus inovatif membuat kebijakan terlebih inovatif dalam membuat kebijakan yang bersangkutan dengan parkir. Kebijakan pemerintah mengenai parkir di satu daerah telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari daerah itu sendiri.

Implementasi kebijakan sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2006:65), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan dari pemerintah setempat dalam peningkatan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan fasilitas parkir. Kebijakan tersebut dibuat untuk menertibkan masyarakat dan cenderung bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peranan

pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah di dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan adalah salah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan dan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyejahterakan masyarakatnya (Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan).

Bagi masyarakat Kabupaten Lamongan pada umumnya tentu kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan ini sangat memberatkan karena masyarakat ditarik dua kali biaya yaitu biaya pajak untuk kendaraan bermotor serta biaya retribusi untuk parkir berlangganan. Namun disisi lain, kebijakan parkir

berlangganan ini dapat mendatangkan penerimaan yang cukup besar dari sektor retribusi. Kebijakan sistem parkir berlangganan ini sebagai salah satu usaha yang di lakukan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan yang nantinya juga akan dinikmati seluruh masyarakat Lamongan dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Lamongan (Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan).

Kebijakan pemerintah yang mengatur berlangsungnya kegiatan parkir di satu daerah maka pemerintah juga memiliki peraturan yang juga berkaitan dengan pendapatan dari jasa parkir. Tentunya pendapatan dari parkir ini tidaklah sedikit dan tentu berpengaruh pada pendapatan daerah ketika parkir ini di kelola oleh pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan, pemerintah daerah lebih bisa mengolah dan mengatur keuangan daerahnya masing -masing. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 salah satu sumber penerimaan daerah adalah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan bahwa Pendapatan Asli daerah diperoleh dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan undang-undang ini maka pemerintah diasumsikan dapat mengontrol pelaksanaan parkir dan juga pendapatan dari parkirnya. Pendapatan dari sekrot parkir diasumsikan bisa mengalami peningkatan di tiap tahunnya dengan mengingat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang semakin tahun semakin bertambah. Tuntutan untuk berinovasi dalam membuat kebijakan untuk menangani jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahunnya telah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan.

Tata letak kota Lamongan yang baik dan indah juga harus didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Namun pelayanan jasa parkir di Kabupaten Lamongan yang dirasa masih kurang optimal baik pelayanan, fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Berangkat dari masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Dispenda Provinsi Jawa Timur membuat suatu program “Retribusi Parkir Berlangganan” dengan payung hukumnya yakni Perda No. 1 tahun 2006 tentang retribusi parkir dan berdasarkan Keputusan Bersama dari berbagai pihak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan membagi sistem parkir menjadi beberapa

sistem yaitu dengan sistem harian dan sistem parkir berlangganan. Kedua sistem itu dilakukan di tempat parkir umum yang dalam hal ini sistem parkirnya dikelola oleh pemerintah. Untuk tempat parkir khusus dapat dikelola oleh pemerintah, perorangan atau badan hukum. Sedangkan tempat parkir insidentil bisa dilaksanakan atas ijin Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum. Parkir berlangganan merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adapun tujuannya untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih inovatif dan juga peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir berlangganan.

Dasar hukum dari kebijakan retribusi parkir berlangganan adalah (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2004, Tanggal 2 Desember 2004, Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir. (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010, Tanggal: 11 November 2010, Tentang: Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. (3) Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 22 Tahun 2004, Tanggal: 31 Desember 2004, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Lamongan No. 6 Tahun 2004. (4) SK. Gub. Prop. Jatim No. 47 Tahun 2011, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dengan Pemerintah kabupaten/Kota di Jawa Timur. (5) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan POLRES Lamongan Nomor: 181.1/1/413.013/2012970/57/120.22/2012B/1986/16/2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Sistem pembayaran parkir berlangganan cukup mudah dan cepat prosesnya masuk ke kas daerah. Pembayaran parkir berlangganan di Kab. Lamongan menggunakan sistem “notice” langsung pada STNK pemberian stiker parkir berlangganan ketika pengurusan pajak tahunan kendaraan bermotor oleh setiap wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Lamongan dan kemudian langsung menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim. Sedangkan parkir harian dimana pengguna jasa parkirnya adalah kendaraan bermotor dengan plat nomor di luar daerah lamongan langsung membayar ke petugas parkir. petugas parkir yang menerima bayar dari pengguna parkir harian dalam hari itu langsung menstorkan kepada petugas dari Dinas Perhubungan Kab. Lamongan dan segera menyetorkan ke Dinas perhubungan. Uang parkir yang terkumpul di Dinas Perhubungan Kab. lamongan akan disetorkan langsung ke PEMDA Lamongan. Dilihat dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah, kebijakan parkir berlangganan dinilai telah sangat berkontribusi melalui pencapaian target yang semakin meningkat tiap tahunnya dan keadaan ini sangat mendorong pemasukan Pemerintah Kab. Lamongan dari sektor retribusi parkir. Melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemda, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir.

Penelitian terkait dengan parkir berlangganan dilakukan oleh oleh Wahyu Dwi Puspita sari mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kab. Nganjuk. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa kebijakan parkir berlangganan di Kab. Nganjuk telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Kebijakan parkir berlangganan Kab. Nganjuk sangat efektif dalam peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dan juga dalam pelayanan publik.

Mengingat pelayanan yang optimal merupakan timbal baik dari pendapatan asli daerah yang terus meningkat dari sektor parkir terlebih dengan adanya kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan. Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Implementasi Perda No. 15 tahun 2010 di Kabupaten Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan di kabupaten Lamongan?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di kabupaten Lamongan
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di kabupaten Lamongan

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber saran bagi Pemerintah Kab. Lamongan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan parkir berlangganan dan lebih terpacu dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah dari sektor retribusi parkir dengan pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan yang lebih efektif serta dapat menjadi inspirasi untuuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir berlangganan. Penelitin ini juga diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota yang ingin menetapkan kebijakan parkir berlangganan sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam perkembangan selanjutnya khususnya studi mengenai kebijakan parkir berlangganan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini, dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi serta Sistematika Penulisan Skripsi terkait dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pada Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan dan menguraikan terkait konsep-konsep, Teori-teori dari Beberapa Sumber Referensi seperti Buku, Jurnal serta Hasil Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi) yang relevan dengan Pokok masalah yakni garis besar teoritis tentang Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah serta Parkir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, menjelaskan Tentang Metode-metode yang digunakan didalam Proposal Penelitian ini. didalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, lokasi dan situs Penelitian, Jenis Dan

Sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, Instrumen Penelitian, Analisis Data serta Keabsahan Data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan maksud untuk menjabarkan berbagai fakta di lapangan terkait dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini Merupakan bab yang menguraikan dan menjelaskan seluruh hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data terkait dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab akhir dalam penulisan bab ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diajukan untuk perbaikan terkait dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *Public Policy*. Dimana banyak sekali para ahli yang memberikan pendapat mereka mengenai pengertian kebijakan publik. Menurut Thomas Dye (1992) dalam Sahya (2014:35), Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dimana alasan kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Hal itu memberikan gambaran bahwa kebijakan publik itu diberikan untuk memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan menurut E.Anderson dalam Islamy (2001:42), “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Wahab (2001:24), menyatakan mengenai batasan kebijakan publik yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

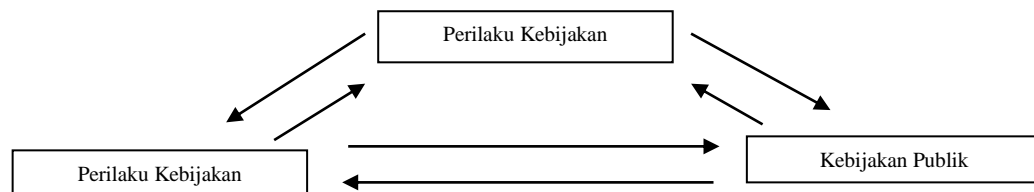
Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketetapan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Sesuai dengan konsep dari kebijakan publik diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian tentang kebijakan publik dalam hal retribusi parkir berlangganan di kabupaten Lamongan sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2012 yang difokuskan pada pengambilan tipe manfaat kebijakan, letak pengambilan keputusan, sumber-sumber daya yang digunakan, pelaksanaan program, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik institusi, dan tingkat kepatuhan.

2. Elemen Kebijakan Publik

Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut. Guna memahami adanya kebijakan publik yang telah ada, terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan

tersebut. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara tiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berikut ini skema tiga elemen sebagaimana yang digambarkan Dunn dalam Sahya (2014:41)



Gambar 1. Tiga elemen sistem kebijakan publik

Sumber: Dunn dalam Sahya (2014:41)

Tampak bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok individu yang mempunyai peran yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kebijakan. Dari pendapat tersebut dapat diidentifikasi bahwa mekanisme kebijakan menunjukkan adanya keterpengaruhan antara pelaku kebijakan, kebijakan itu sendiri dan lingkungan kebijakan. Jadi dalam implementasi kebijakan terdapat variabel -variabel yang saling berhubungan membentuk kaitan antara kebijakan publik dan pencapaian yang diharapkan.

3. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik, bersumber pada kenyataan bahwa suatu kebijakan itu dirumuskan oleh beberapa orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para ketua suku, tetua adat, para legislator, para eksekutif, para hakim, para administrator, para monarki dan

lain sebagainya. Penjelasan di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep ciri-ciri kebijakan publik (Wahab, 2012:20) yaitu:

- a. Pertama, Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang memiliki unsur keberuntungan, serba acak dan kebetulan.
- b. Kedua, Pada hakikatnya, kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, yang dimana tindakan-tindakan ini dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Ketiga, Kebijakan memiliki kaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
- d. Keempat, Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin juga berbentuk negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, kebijakan publik kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam suatu masalah dimana campur tangan pemerintah justru sangat diperlukan.

4. Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Bambang Margono (2003:22), Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk :

- a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- b. Melindungi hak-hak masyarakat
- c. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan inilah kebijakan publik dilaksanakan dengan hasil akhir yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat, sehingga target kebijakan dapat tercapai dan tepat sasaran.

5. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Menurut Bambang Margono (2003:23), Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Merumuskan suatu kebijakan publik diatur menurut urutan waktu secara bertahap dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Tahapan ini mencerminkan kegiatan yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Energi dan lingkungan
- b. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Kesehatan
- d. Kesejahteraan sosial
- e. Kesempatan kerja
- f. Komunikasi
- g. Masalah internasional
- h. Masalah perkotaan
- i. Pendidikan
- j. Pembangunan
- k. Transportasi

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam kehidupan masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang berarti keikutsertaan masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan publik. Hal itu dikarenakan masyarakat sendiri mengetahui dalam mengalami permasalahannya. Membuat kebijakan publik merupakan proses pembuatan keputusan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dengan cara memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik, kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam studi ini peneliti

mendeskripsikan proses perumusan kebijakan publik menyangkut tentang transportasi, dimana peneliti menganalisa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Lamongan berdasar Perda Nomor 15 tahun 2010.

6. Proses Pengambilan Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2000:4) dalam Bambang Margono (2003:23).

Tahap-tahap dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama.

b. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif

c. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

d. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia

e. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi

persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2012:232), Kalau orang melihat konsep implementasi itu dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Dengan demikian, teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan, sesudah diberlakukannya undang-undangan atau ketentuan perundangan. Dalam realita, mengingat kompleksnya persoalan yang muncul, tentu saja pemahaman kita tentang makna implementasi kebijakan tidaklah sedemikian formal, linier, kaku, dan normatif seperti itu.

Dilihat dari arti luas, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama antara diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergisasi yang digerakan untuk bekerjasama guna menetapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan dibalik langkah seperti itu tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol

serta tetap terjaga pada relnya. Hal ini berarti tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan. Secara sederhana, situasi implementasi mungkin dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kereta kencana berpenumpang yang ditari oleh empat ekor kuda yang warna kulitnya beragam: hitam, putih, coklat, dan abu-abu. Seorang sains kereta yang piawai tentu saja harus memahami karakter individual dan perilaku masing-masing kuda. Ia harus mampu menciptakan kerja sama sedemikian rupa dengan keempat ekor kuda tersebut. Penyikapan kognitif ini dimaksudkan agar keserempakan tempo berlari kuda-kuda (yang berbeda karakter) itu tetap terkontrol, dan yang terpenting kereta tidak terguling (Wahab, 2012:232)

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012:135) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Meter dan Hornn juga menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Grindle (1980:7) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi

baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Wahab (2012: 135), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan dari pemerintah setempat dalam peningkatan pelayanan publik khususnya berkaitan dengan fasilitas parkir. Kebijakan tersebut dibuat untuk menertibkan masyarakat dan cenderung bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah di dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Publik

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (1991: 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

- a. Tahap I:
 - 1) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
 - 2) Menentukan standar pelaksanaan
 - 3) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
- b. Tahap II:

Pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode
- c. Tahap III:
 - 1) Menentukan jadwal
 - 2) Melakukan pemantauan
 - 3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Tahap-tahap yang sejalan juga dirumuskan oleh Wahab (2012:203), adapun tahapan-tahapan dalam proses implementasi kebijakan antara lain:

- a. Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksana
- b. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut
- c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana
- d. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut
- e. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti

berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha administratif maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implelementasi kebijakan negara.

Dengan berdasar pada tahapan-tahapan ini, dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa apakah tahapan-tahapan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan prosedur dan teori-teori yang ada.

3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan publik dalam retribusi parkir di Lamongan, maka peneliti mengumpulkan teori tentang model-model implementasi kebijakan publik yang akan dijadikan acuan pneliti dalam menentukan model implementasi apa yang telah diterapkan di Kabupaten Lamongan. Model-model tersebut antara lain:

a. Model Van Meter dan Van Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn, beliau bersandar pada karya Pressman dan Wildavsky, namun diberi sentuhan progressif menjadi sebuah model proses implelementasi. Pendekatan-pendekatan sebelumnya meski dianggap sangat membantu memahami proses implementasi, namun sangat kurang dalam

kerangka teoritik. Dalam mengembangkan kerangka teoritis, mereka didasarkan pada 1) teori organisasi, 2) studi tentang dampak kebijakan publik dan 3) berbagai studi hubungan antar-pemerintah.

Van Meter dan Van Horn memulai analisisnya dengan pertimbangan kebutuhan untuk mengklasifikasi kebijakan untuk memberi solusi pada kesulitan yang terjadi dalam ranah implementasi. Implementasi, hemat mereka, akan sukses ketika sedikit perubahan diperlukan dan tujuan konsensus tinggi. Berkaca pada ragam kasus, secara pragmatis kebijakan dengan perubahan yang terjadi secara incremental justru biasanya akan mendapat banyak dukungan, oleh karenanya jika menginginkan kebijakan terimplementasikan dengan baik, maka sebaiknya dengan perubahan marginal yang terjadi secara incremental. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik sebagai berikut: 1) *policy standards and objectives* (standar yang jelas dan tujuan kebijakan); 2) *the resources and incentives made available* (sumber-sumber kebijakan); 3) *the quality of inter-organizational relationships* (kualitas hubungan interorganisasional); 4) *the characteristics of the implementation agencies* (karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana); 5) *the economic, social and political environment* (lingkungan politik, sosial, dan ekonomi); dan 6) *the 'disposition' or 'response' of the implementers* (disposisi atau tanggapan atau sikap para pelaksana), yang mana satu sama lain proses saling berkelindan dan menjadi rangkaian tahapan sistemis yang dilakukan secara longitudinal. (Sahya, 2014:240-243).

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Nugroho (2006:129-130), Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel Independen
Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
- 2) Variabel Intervening
Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Variabel Dependen
Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model Hogwood dan Gunn

Wahab (2006:167-172), Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu yakni:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi. Pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih komplek dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 8) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program
- 9) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika kebijakan dapat dilaksanakan dengan memebuhi syarat-syarat dan kriteria diatas maka kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan sempurna dan hasilnya akan sesuai target yang diinginkan dan dapat mensejahterakan masyarakat.

d. Model Merilee S. Grindle

Model selanjutnya adalah Model Implementasi Kebijakan oleh Merilee S.

Grindle. Menurut Merilee S. Grindle dalam Sahya (2014:254) mengatakan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan public tergantung pada variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), serta tingkat keberhasilannya bergantung pada tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan. Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
 - a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - 1) Dampak
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi
- 2) Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

- a) Isi Kebijakan (*Content of Policy*), mencakup :
- 1) *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi). *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
 - 2) *Type of Benefits* (Tipe Manfaat). Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - 3) *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai). Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
 - 4) *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan). Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
 - 5) Program Implementer (Pelaksana Program). Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
 - 6) *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik
- b) Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*), mencakup :
- 1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
 - 2) *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya,

maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- 3) *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana). Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Sahya (2014:256):

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

e. Model Edward III

George C. Edwards III dalam Abidin (2002:131-133) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack to attention to implementation*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu

a) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi serta koordinasi merupakan elemen yang ikut memegang peranan penting didalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Semakin kuat komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat didalam proses pengimplementasian kebijakan maka semakin kecil pula kemungkinan akan timbulnya kesalahan-kesalahan dari pelaksanaannya dilapangan.

b) Sumber daya (*resources*)

Keberhasilan maupun kegagalan pengimplementasian sebuah kebijakan ikut ditentukan oleh faktor sumber daya. Sumber daya disini yang dimaksudkan adalah ketersediaan akan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama serta sumber daya penunjang yaitu ketersediaan sumber daya anggaran. Sedangkan Subarsono (2005:100) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non-manusia.

c) *disposition* (Kesediaan dan komitmen)

Sikap menerima atau menolak dari para agen pelaksana akan kebijakan yang diimplementasikan ikut mempengaruhi atau berperan didalam keberhasilan pengimplementasian kebijakan. hal ini dimungkinkan agar pelaksanaan dari kebijakan yang telah disepakati mampu mengatasi persoalan dan masalah yang terjadi. disposisi implementor memiliki 3 hal penting didalamnya, yakni respond implementor terhadap kebijakan, kognisisi atau pemahaman terhadap kebijakan, dan prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor didalam pengimplementasian kebijakan.

d) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structures*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama

adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operational procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan beberapa model-model implementasi yang dipaparkan oleh para ahli diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap teori tentu memiliki keunggulan tersendiri dari teori lainnya. Ini menunjukkan bahwa tidak adanya pilihan model yang terbaik. Yang perlu diingat bahwa kita tentu harus memilih model yang sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri, hal ini dimaksudkan agar apapun model yang digunakan dapat berjalan secara efektif dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada.

Adapun didalam penelitian ini, maka penulis lebih memilih Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang menguraikan kajian tentang Komunikasi organisasi dalam aktivitas implementasi, Sumber daya pendukung (*resources*) dalam mendukung berjalannya implemetasi sebuah kebijakan, Disposisi yakni Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan, serta Struktur birokrasi yang dibentuk didalam mengimplemetasikan kebijakan

yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini dikarenakan menurut penulis, elemen-elemen yang terdapat dalam Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dianggap lebih relevan dan secara spesifik mampu mengupas fenomena lapangan terkait dengan judul penelitian yaitu Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu bentuk dari model Edward III menurut penulis lebih sederhana sehingga akan sangat mudah dipahami penggunaannya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

4. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Publik

Nugroho (2009:120), Beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik adalah pendekatan secara *top-down*, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain. Yang kedua adalah pendekatan secara *bottom-up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi

kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi.

Menurut Wahab (2006:163), pada intinya, logika dalam pendekatan *top-down* selalu diawali dengan keputusan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah (pusat) dan kemudian mempersoalkan hal-hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana tindakan para pelaku implementasi serta kelompok sasaran sejalan/konsisten dengan tujuan serta prosedur didalam keputusan kebijakan?
- 2) Sampai sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program/proyek/aktivitas tertentu dijalankan beberapa waktu, atau sejauh mana dampak yang timbul benar-benar konsisten dengan tujuan?
- 3) Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keluaran (output) dan dampak (impact) kebijakan, baik yang relevan bagi kebijakan pemerintah maupun kebijakan politis lain yang signifikan?
- 4) Bagaimana kebijakan direformulasikan dari waktu ke waktu sejalan dengan pengalaman yang diperoleh?.

Menurut Nugroho (2011), pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat? Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- 2) Ketepatan pelaksana. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
- 3) Ketepatan target implementasi. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain; b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atautkah tidak, kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak; c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
- 4) Apakah lingkungan implementasi sudah tepat, Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu a) lingkungan kebijakan, merupakan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan

dan lembaga lain yang terkait; b) lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

- 5) Tepat proses. Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu: a) *policy acceptance*, di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; b) *policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; c) *strategic readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka implementasikan kebijakan dapat dilakukan melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Menurut peneliti kedua pendekatan ini bagus untuk pengimplementasian kebijakan, namun dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan ini, peneliti melakukan penelitian implementasi kebijakan retribusi parkir dengan pendekatan top-down dengan mengacu pada kriteria yang disampaikan oleh Wahab.

5. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle dan Quade dalam Sahya (2014:261), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu di arahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana karena didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Adapun lingkungan kebijakan bergantung pada sifatnya yang positif dan negatif.

Jika lingkungan berpandangan positif terhadap kebijakan, akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif, akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam gagal. Lebih dari tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Sahya Anggara (2014:262), didasarkan pada tiga aspek yaitu :

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana di ataur dalam undang-undang;
- b. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

Menurut Goggin et.al. dalam Sahya Anggara (2014:262), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel:

- a. Dorongan dan paksaan di tingkat federal;
- b. Kapasitas pusat/negara;
- c. Dorongan dan paksaan ditingkat pusat dan daerah .

Variabel dorongan dan paksaan di tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah, semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan, dapat dilihat melalui:

- a. Besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan, semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan;
- b. Bentuk kebijakan yang memuat, antara lain kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan, dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapisitas pusat atau kapisitas organisasi dapat dilihat seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memaafkan wewenang yang dimiliki, hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada, dan mengoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi dan masyarakat.

Quade dalam Sahya (2014:263) memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik, antara lain sebagai berikut.

- a. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola intraksi yang diimpikan agar orang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan.
- b. Kelompok target, yaitu subjek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subjek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Organisasi yang melaksanakan, yaitu berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan.

6. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Wahab (2012:167), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

7. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sunggono (1994: 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- b. Informasi
 Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- c. Dukungan
 Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi
 Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

8. Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan, demi mewujudkan peran pemerintah daerah, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan

pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan adalah salah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Berlangganan, Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan dan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyejahterakan masyarakatnya. Mengimplementasikan suatu bentuk perundang-undangan atau suatu kebijakan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, akan banyak dijumpai berbagai macam masalah dan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam menerapkan suatu produk hukum diperlukan langkah-langkah yang faktual agar perundang-undangan sebagai bentuk payung hukum suatu kebijakan yang diciptakan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya, misalnya dengan cara meningkatkan sosialisasi, meningkatkan sarana pelayanan, dan lain

sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dua sisi yang berbeda yaitu dampak positif serta dampak negatif, baik bagi pemerintah maupun bagi publik atau masyarakat terlebih kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan penarikan retribusi parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Berlangganan, bagi masyarakat Kabupaten Lamongan pada umumnya tentu kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan ini sangat memberatkan karena masyarakat ditarik dua kali biaya yaitu biaya pajak untuk kendaraan bermotor serta biaya retribusi untuk parkir berlangganan. Namun disisi lain, kebijakan parkir berlangganan ini dapat mendatangkan penerimaan yang cukup besar dari sektor retribusi. Kebijakan sistem parkir berlangganan ini sebagai salah satu usaha yang di lakukan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya juga akan dinikmati seluruh masyarakat Lamongan dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan.

C. Otonomi Daerah

1. Hakikat Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa konsep Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pernyataan Undang-Undang diatas sesungguhnya daerah mempunyai legitimasi yang kuat dengan kekuatan hak, wewenang, dan kewajiban

untuk mengurus sendiri dan mengatur daerahnya masing-masing dengan tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk menyelenggarakan dan mengimplementasikan konsep otonomi daerah dalam pemerintahan, maka menurut Pasal 2 ayat 2 bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Otonomi Daerah dan Desentralisasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut “asas otonomi dan tugas pembantuan”. Yang dimaksud dengan “asas otonomi dan tugas pembantuan” itu adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintahan kabupaten/kota ke desa. Pemerintahan daerah provinsi bisa langsung memberikan penugasan terhadap pemerintahan kabupaten/kota atau penugasan pemerintahan kabupaten/kota ke desa, penugasan yang dimaksud ini tentu bukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan politik sehingga seorang bupati atau walikota bisa dijabat gubernur, karena jelas bahwa UU Nomor 23 tahun 2014 ini memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk menilai, memilih atau memberhentikan kepala daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan diselenggarakannya Otonomi daerah lebih lanjut dijelaskan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif

masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli. Dasar hukum penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

2. Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting bagi pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Namun masalahnya bukan hanya berupa jumlah yang tersedia, tapi juga sampai seberapa jauh jumlah kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya yang ada di daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat didukung oleh kemampuan keuangan daerah atau potensi keuangan daerah. Maka sebagai tindak lanjut dari

pemerintah yakni melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun komponen-komponen terpenting dari pembangunan daerah yang sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditemukan dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 79 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yaitu ;

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Dana perimbangan,
 - 2) Pinjaman daerah,
 - 3) Lain lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, merupakan batasan wewenang yang diberikan pusat kepada daerah dengan berbagai kebijakan dalam pelaksanaannya berdasarkan kemampuannya masing-masing.

3. Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari kata pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran. Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib

retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

E. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Sebab retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang retribusi daerah, terlebih dahulu perlu diketahui apa penerimaan retribusi itu sendiri, dan perlu juga dibedakan pengertian pajak dan retribusi.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang pada intinya mekanisme evaluasi retribusi untuk daerah diatur dengan peraturan daerah masing-masing daerah yang bersangkutan. Adapun Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah:

- a. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung kepada yang berkepentingan.
- b. Wewenang atas pungutan retribusi adalah Pemerintah Daerah
- c. Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.

- d. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 1997 pasal 2 ayat 2 disebut dengan retribusi daerah tidak dimasukkan pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha itu dianggap sebagai perusahaan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dari retribusi daerah bukanlah mencari keuntungan, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat serta perbedaan zaman. Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud diatas, yang wajar sesuai dengan imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

2. Objek dan Golongan Retribusi

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya namun hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu hal itu diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat (1).

Menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- c. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi jalan Umum
- e. Retribusi Pelayanan Pemekaran dan Penguburan Mayat
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Retribusi Air Bersih
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
- k. Retribusi Pengujian Kapal perikanan

Selanjutnya Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang di sediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat jugadisediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenisnya terdiri dari ;

- a. Retribusi Pasar atau Pertokoan.
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Retribusi Tempat Penitipan Anak.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- f. Retribusi Penginapan / Persinggahan Villa.
- g. Retribusi Penyedotan Kasus
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- i. Retribusi Tempat pendaftaran.
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olaraga
- k. Retribusi Penyebrangan Diatas Air
- l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- m. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Sedangkan pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan pengendalian dan

pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi, akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Jenis – jenis retribusi perizinan, terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin Trayek.
- c. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- d. Retribusi Izin Gangguan.
- e. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.

Adapun tujuan dari pengelolaan jenis tarif retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis – jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Secara spesifik untuk jenis jenis pelaksanaan retribusi yang dilaksanakan dan dikelola oleh dinas perhubungan Kab. Lamongan sebagai berikut :

- a. Retribusi parkir di tepi jalan Umum dan Retribusi Tempat khusus Parkir Berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang terminal angkutan penumpang.
- b. Retribusi pengelolaan dan Retribusi Terminal
- c. Berdasarkan peraturan nomor 3 tahun 2000 tentang terminal angkutan penumpang.
- d. Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota
- e. Berdasarkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Angkutan
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang pengujian kendaraan bermotor

3. Retribusi Parkir

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir sendiri ialah

pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengeloalaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Lamongan. Retribusi Parkir dipungut terhadap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Parkir di lahan parkir yang disediakan Pemerintah Kota Lamongan. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan retribusi parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan lahan parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Besarnya retribusi yang harus dibayar dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa parkir.

Adapun umumnya subyek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir. Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan Parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.

F. Parkir

1. Definisi Parkir

Siahaan (2013:140), Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang/barang.

Siahaan (2013:141), Ada tiga jenis utama parkir, yang berdasarkan pengaturan posisi kendaraan, yaitu parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong :

a. Parkir paralel

Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan.

Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

b. Parkir tegak lurus

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.

c. Parkir serong

Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

2. Fasilitas parkir

Siahaan (2013:142), Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat

berupa taman parkir dan/atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Fasilitas parkir berbentuk:

- a. Parkir di pinggir jalan
- b. Parkir di luar badan jalan

3. Kebijakan Parkir

Siahaan (2013:145), Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain:

- a. Kebijakan tarip parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarip lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.
- b. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan.
- c. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan

dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda seperti yang dilakukan di Palembang.

4. Pajak Parkir

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan pajak parkir menurut Siahaan (2013:471) adalah sebagai berikut.

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- e. Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Bagian Ketujuh Pasal 39-44 tentang Pajak Parkir.

6. Objek dan Subjek Pajak Parkir

Menurut Siahaan (2013:472-473), Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luarbadan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbalbalik; dan
- d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak parkir menurut Siahaan (2013:474-475) adalah sebagai berikut.

- a. Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari sewa/tarif parkir yang dikumpulkan. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- b. Tarif Pajak Parkir

Tarif parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan oleh

pemerintah daerah kabupaten / kota yang bersangkutan.

c. Perhitungan Pajak Parkir

Secara umum Perhitungan Pajak Parkir adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang Seharusnya Dibayar kepada penyelenggara tempat parkir}$$

Siahaan (2013:477-478) menyatakan wajib pajak parkir wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada dinas pendapatan daerah kabupaten / kota, terutang perhitungan, pemungutan dan pembayaran pajak parkir yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPND setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan sampaikan kepada walikota atau bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Siahaan (2013:481-483) mengungkapkan pembayaran dan penagihan pajak parkir adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran Pajak Parkir

Pembayaran pajak parkir yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang dilakukan oleh bupati/walikota.

b. Penagihan Pajak Parkir

Penagihan pajak yang dilakukan dengan memberikan surat teguran

atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak surat teguran atau surat peringatan pajak, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

7. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Parkir.

Untuk bagi hasil pajak dan biaya pemungutan Pajak Parkir menurut Siahaan (2013:490) adalah:

a. Bagi Hasil Pajak Parkir

Hasil penerimaan Pajak Parkir merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota.

b. Biaya Pemungutan Pajak Parkir

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Parkir, diberikan hanya sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif maka analisis datanya dilakukan dengan cara induktif-kualitatif. Dimana penelitian kualitatif berkembang sebagai suatu metode *disciplined inquiry* yang lebih induktif sifatnya. Dalam hal ini tentunya peneliti perlu memiliki kadar keterlibatan yang tinggi (dengan segenap jiwa dan raganya) aktif mendengar, observasi, bertanya, mencatat, terlibat, menghayati, berfikir dan menarik inferensi dari apa yang dipelajari (Sanapiah, 1990). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan lebih mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan, dimana masalah sosial dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2010 dalam menunjang pendapatan asli daerah kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012:6), Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut permasalahan yang diangkat, peneliti berusaha untuk mengetahui secara mendalam, mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan. Disamping itu,

penelitian ini juga lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, adapun fokus penelitian berlandaskan kepada didasarkan pada Perda No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Berlangganan di kabupaten Lamongan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini menggunakan model implemetasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yakni sebagai berikut :

1. Implemetasi Kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Lamongan yang meliputi :
 - a. Komunikasi
 - a) Hubungan komunikasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, swasta atau penyedia jasa petugas parkir dan masyarakat.
 - b) Program komunikasi melalui media cetak & elektronik, serta media sosialisasi.
 - b. Sumberdaya
 - a) Sumberdaya Manusia sebagai sumberdaya utama dalam melaksanakan program parkir berlangganan.
 - b) Sumberdaya anggaran sebagai sumberdaya penunjang pelaksanaan program parkir berlangganan.
 - c. Disposition
 - a) Komitmen pelaksanaan kebijakan aparatur Dinas Perhubungan

kabupaten Lamongan dan tenaga Kontrak (Juru parkir)

b) Komitmen Masyarakat sebagai penerima kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

a) Mekanisme Kebijakan (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan

b) Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan

c) Mekanisme koordinasi antara para implementator

2. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Lamongan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian dalam studi ini adalah kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada aspek kemudahan dalam mengakses informasi. Peneliti dengan mudah memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan di Lamongan karena lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti. Selain itu alasan lain pemilihan lokasi penelitian ini adalah Tata letak kota Lamongan yang baik dan indah juga harus didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat atau area yang berada pada lokasi penelitian. Situs penelitian dalam studi ini adalah Dinas perhubungan Kab. Lamongan dikarenakan dinas perhubungan kabupaten lamongan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk dalam melakukan monitoring dan

pengawasan terkait dengan implemetasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Lamongan

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen resmi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat oleh peneliti. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
- b. Bapak Tony Ariantoro, SAP. MM selaku Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas Dinas Perhunganan Kabupaten Lamongan Juru Parkir, dan masyarakat Kabupaten Lamongan.
- c. Ibu Suryani Indarti, SE selaku Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
- d. Bapak Toyibatul Af'al selaku Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
- e. Bapak Muhamad Sobandi selaku masyarakat di Kompleks Ruko Basuki Rahmat, Lamongan.
- f. Bapak Nuryanto Wahid selaku masyarakat lamongan, di Ruko Otik Raya,

Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kabupaten Lamongan

- g. Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat lamongan di pasar sidoharjo,
Jalan Pahlawan, Kabupaten Lamongan
- h. Bapak Imron Malik sebagai masyarakat Lamongan di Jalan Sunan Drajat,
Kabupaten Lamongan
- i. Bapak Nur Salim yang berprofesi sebagai petugas juru parkir di Toko Kali
Kuning Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
- j. Bapak Sa'ad Daroni yang berprofesi sebagai petugas juru parkir, di Toko
Bintang Jaya Jln. KH. Hasyim Asyahr, Kabupaten Lamongan

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari beberapa media perantara atau diperoleh dan dicatat pihak lain. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan literature, dokumen, peraturan-peraturan dan juga renfrensi dari internet ataupun koran untuk membantu apa saja yang dibutuhkan oleh peneliti agar dapat melengkapi data pada penelitian ini.

Menurut Arikunto (2006:129) bahwa dalam rangka mempermudah dan mengklarifikasikan data, sumber data dapat diidentifikasi menjadi tiga yaitu :

- a. *Person*, yaitu sumber data bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan, atau jawaban tertulis melalui angket/questioner.
- b. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, simbol, dan lainnya.
- c. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.

Maka dari itu, pembagian sumber data dalam penelitian sebagai berikut ini :

- a. Informan, peneliti dalam melakukan informasi awal maka peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu dan juga pra riset, kemudian peneliti memilih informan secara *purposive*, pada subjek penelitian yang akan menguasai permasalahan yang diteliti. Lalu untuk mendapatkan informan yang selanjutnya, peneliti meminta kepada informan yang awal untuk memberikan informasi dan juga menentukan siapa yang selanjutnya kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Dokumen, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dianggap relevan pada lokasi dan situs penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan juga sesuai dengan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya itu peneliti juga mencari data yang berhubungan langsung dengan profil lokasi penelitian. Adapun teknik ini dilakukan untuk melengkapi informasi peneliti dan agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi.
- c. Tempat atau Lokasi sebagai sumber data tambahan yang dilakukan dengan melalui kegiatan observasi secara langsung pada tempat dan lokasi yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu dengan menggunakan penelitian secara langsung dengan mewawancarai pihak-pihak penyelenggara retribusi seperti penanggung jawab retribusi dan petugas parkir, keperpustakaan (*library research*), buku-buku, makalah, jurnal serta sumber tertulis yang relevan dan *study cyber media* (melalui internet) yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan. Teknik memperoleh data bisa dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Metode interview/wawancara

Wawancara dilakukan pada instansi-instansi yang terkait, seperti pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mengenai penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan melalui retribusi daerah, serta penerimaan retribusi parkir berlangganan pada khususnya. Selain itu pada Dinas Perhubungan dan UPT Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (Menrek) Dishub Kabupaten Lamongan terkait dengan perannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan, data-data terkait dengan lokasi parkir berlangganan; jumlah juru parkir; realisasi pendapatan retribusi parkir Kabupaten Lamongan; dan mekanisme bagi hasil retribusi parkir berlangganan dengan pihak-pihak yang terkait. Serta pada instansi-instansi terkait lainnya seperti pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) mengenai Mekanisme bagi hasil retribusi parkir berlangganan dan contoh stiker parkir berlangganan serta contoh

karcis parkir umum kendaraan bermotor luar kota dan provinsi. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya terkait dengan cara pemerintah daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir Berlangganan. Selain itu diperlukan wawancara secara terstruktur terhadap informan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin. Agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap informan. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dan menguasai informasi tentang kondisi Parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan. Baik dalam hal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam hal peningkatan pelayanan dalam bidang parkir di tepi jalan umum.

Jika melalui wawancara pada instansi-instansi terkait belum mendapatkandata yang akurat, peneliti perlu menggunakan metode snowingball sampling.Dimana peneliti dapat mencari data melalui informan yang lain seperti melakukansampling kepada beberapa Juru Parkir serta beberapa masyarakat baik yang sudah menerapkan sistem parkir berlangganan maupun yang belum menerapkan sistem parkir berlangganan tersebut.

2. Pengamatan/Observasi

Peristiwa atau fenomena di lapangan penelitian merupakan sumber data yang diperoleh melalui teknik obsevasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap objek yang diamati. Pengamatan pada penelitian ini dilakukan di situs-

situs penelitian dengan mencatat dan mendokumentasikan beberapa peristiwa yang terjadi. Selama melakukan pengamatan, peneliti mempertimbangkan aspek sosial dalam peristiwa atau fenomena tersebut dengan tidak mencatat secara langsung peristiwa atau temuan penelitian, karena peneliti harus mempertimbangkan kode etik dan privasi individu dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait.

Pedoman observasi yang sudah disiapkan adalah mengetahui upaya atau usaha apasaja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap retribusi parkir berlangganan; mengetahui alokasi dana yang dihasilkan melalui retribusi parkir berlangganan; mengetahui hasil perolehan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan pertahunnya; dan mengetahui kontribusi parkir berlangganan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian data yang diperoleh akurat melalui informan-informan yang dipercaya.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen adalah sumber data dari teknik dokumentasi. Teknikdokumentasi adalah penyampaian dokumen untuk mempertahankan keasliandokumen itu sendiri, yang biasanya berupa data yang sudah tersedia di lapangan. Dalam penelitian ini, dokumen tersebut sudah disediakan oleh pihak instansi, seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, UPTD Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan serta Kantor Bersama Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT). Dokumen-dokumen yang didapat dari Dinas Perhubungan atau UPTD Parkir adalah Profil Kabupaten Lamongan, Luas wilayah Kabupaten Lamongan, Profil Dinas Perhubungan, Profil

UPTD Parkir, lokasi diterapkannya parkir berlangganan, mekanisme pembayaran parkir berlangganan, mekanisme pembayaran parkir di tepi jalan umum kendaraan bermotor luar kota dan provinsi atau parkir harian, mekanisme bagi hasil retribusi parkir berlangganan dengan instansi-instansi terkait, jumlah juru parkir yang telah ditetapkan oleh dinas serta peran yang dilakukan terkait dengan Retribusi Parkir Berlangganan. Selain itu dokumen-dokumen yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mengenai penerimaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lamongan per-tahunnya.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan instrumen penelitian yang tepat dan sesuai dengan teknik pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan mempunyai validitas dan realibilitas yang tinggi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti sendiri (*human instrument*) dalam mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan, sehingga didapatkan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti secara representative yang berguna sebagai bahan analisa berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan.
- b. Pedoman wawancara (*interview Guide*), yaitu serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten

Lamongan yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan dan agar hasil yang diharapkan dapat dimaksimalkan.

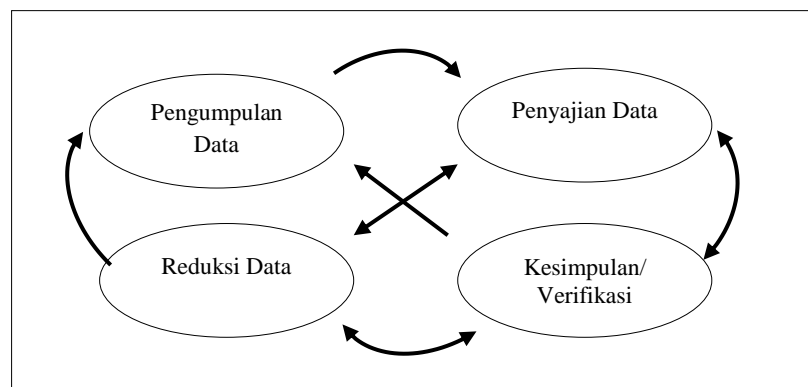
- c. Catatan lapangan (*Field Note*), buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian yang berkaitan dengan terkait dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan.

G. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data penelitian ini akan mengacu pada model yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai, yakni: reduksidata (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusions : drawing/ verifying*) Data yang digunakan dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang bersifat primer maupun yang sekunder adalah data kualitatif, sehingga teknis analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data secara deduktif, yakni mulai dari dasar-dasar pengetahuan umum sebagai dasar analisis, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dari proses analisis ini kemudian

ditarik suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian berlangsung adalah menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Miles dan Huberman (2014:8) mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat 3 alur kegiatan, meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014)

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, menyortir, dan mengorganisasikan data. Dalam penelitian yang akan dilakukan data yang akan diproduksi meliputi gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Gambaran ini meliputi : Lokasi penelitian, alur pikir instansi (Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Tujuan Pembentukan Instansi), batas wilayah kewenangan, struktur organisasi, sumber daya manusia.

2. Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk paling umum yang digunakan berupa teks uraian. Dalam penelitian data yang disajikan meliputi Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Merupakan kegiatan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh di lapangan agar data tersebut terbukti keabsahannya/valid. Dari proses reduksi data sampai penyajian data kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan penelitian berdasarkan model implemetasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III

Ketiga kegiatan tersebut antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan suatu jalinan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam pandangan ini, ketiga alur kegiatan dalam proses analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat kegiatan tersebut selama melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti harus bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian yang merupakan suatu upaya berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Ketiga kegiatan tersebut

merupakan suatu gambaran atau menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian dari kegiatan analisis yang saling menyusul dan melengkapi.

H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas, karena dalam penelitian kualitatif kriteria utama pada data penelitian adalah valid, eliable, dan objektif. Teknik pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 2007: 327), yaitu “perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian”. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga teknik, meliputi :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian bahkan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan keikutsertaan digunakan peneliti untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengamatan dan wawancara secara terus menerus dengan informan yang pernah ditemui ataupun baru ditemui baik dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagai Implementor dari Kebijakan Parkir Berlangganan serta para petugas juru parker yang bertugas sebagai tenaga

pembantu/kontrak didalam mempermudah proses pengimplementasian kebijakan parker berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan hingga data yang diperoleh akan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan menggunakan seluruh panca indera meliputi pendengaran dan insting peneliti sehingga dapat meningkatkan derajat keabsahan data. Oleh karena itu, peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam melakukan pengamatan dan wawancara ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagai Implementor dari Kebijakan Parkir Berlangganan serta lokasi/titik parkir yang telah ditentukan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

3. Triangulasi

Denzin (Moleong, 2007: 178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan memanfaatkan peneliti untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mengkonsultasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing skripsi. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan pengamatan, apa yang dikatakan dengan situasi penelitian sepanjang waktu, pandangan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat, serta

membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang terkait. Triangulasi dengan metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi dengan teori dilakukan dengan mengurai pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari penjelasan pembanding. Oleh karena itu, peneliti akan menyesuaikan data hasil wawancara dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Para Petugas Juru Parkir dan Masyarakat sebagai sasaran dari adanya implementasi kebijakan parkir berlangganan dengan pengamatan (observasi), hasil data wawancara kedua pihak dengan data dokumen yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, data hasil pengamatan dengan data dari dokumen yang diperoleh, serta pandangan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat yang diperoleh dari masyarakat dalam waktu yang berbeda-beda untuk memperoleh data yang valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

a. Profil Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan berasal dari nama Lamongan yaitu seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Hadi. Hadi tersebut merupakan santri dari Sunan Giri II, dengan ilmunya agama Islam yang cukup, Hadi lantas dipercaya untuk menyebarkan ajaran Islam ke barat Kasunan Giri. Dengan pembekalan, pengawalan dan seorang pembantu, Hadi pun berangkat melaksanakan perintah Sunan Dalem Menyebarkan ajaran Islam di wilayah Lamongan. Rombongan penyebar agama Islam ini berangkat menyusuri Kali Lamong dengan naik perahu. Perahu tersebut berhenti di tempat bernama Dukuh Srampoh, Pamotan. Rombongan syiar Islam ini lantas melanjutkan perjalanan darat hingga sampai di Puncakiwangi di Desa Babat. Kedatangan Islam di daerah ini diterima cukup baik oleh masyarakat tersebut. Perkampungan Islam yang dibangun oleh Hadi lambat laun berkembang cukup pesat dan baik. Seiringi dengan berkembangnya waktu, perjalanan syiar Islam Hadi berlanjut hingga ke Sunan Giri III. Karena keberhasilan yang sebelumnya dalam berdakwah, Hadi mendapat pangkat Ranga dari Sunan Dalem yang berarti penjabat. Keberhasilan dan cara dakwah Rangahadi dalam menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut membuatnya dicintai oleh masyarakat. Kemudian warga menyematkan julukan ke Rangahadi Mbah Lamong lantaran sifat mengasuh & melayani masyarakat yang

yang benar-benar baik, kawasan inilah disebut Lamongan

Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, tidak lain adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan hari pasamuhan agung yang diselenggarakan di Puri Kasunanan Giri di Gersik yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para Sentana Agung Kasunanan Giri. Pelaksanaan Pasamuhan Agung tersebut bertepatan dengan peringatan hari besar Islam yanti Idhul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Berbeda dengan Kabupaten lain khususnya di Jatim yang kebanyakan mengambil sumber dari prasasti/Candi dan dari peninggalan sejarah yang lain, tetapi hari lahir Lamongan mengambil dari sumber buku wasiat. Silsilah Kanjeng Sunan Giri yang ditulis tangan dalam huruf Jawa Kuno yang disimpan oleh juru Kunci Makam Giri di Gersik. Almarhum Bapak Muhammad Baddawi di dalam buku tersebut ditulis bahwa diwisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam pasamuhan agung di tahun 976 H. Namun yang ditulis dalam buku wasiat tersebut memang hanya tahunnya saja, sedangkan tanggal hari, dan bulannya tidak dituliskan. Oleh karena itu, panitia khusus penggali hari jadi Lamongan mencari pembuktian sebagai dasar yang kuat guna mencari dan menetapkan tanggal, hari dan bulannya, setelah panitia menelusuri buku sejarah terutama yang bersangkutan dengan Kasunanan Giri serta sejarah para wali dan adat istiadat di waktu itu. Akhirnya panitia menemukan bukti bahwa adat atau tradisi kuno yang berlaku pada zaman Kasunanan Giri dan Kerajaan Islam di Jawa waktu itu selalu melaksanakan pasamuhan agung yang utama dengan memanggil menghadap para

Adipati Tumenggung serta pembesar lainnya yang sudah memeluk agama Islam. Pasamuhan Agung tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Hari Peringatan Islam tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Garebeg Besar atau Idhul Adha. berdasarkan adat yang berlaku pada waktu itu, panitia menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama dilakukan dalam Pasamuhan Agung Garebeg Besar pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun 976 Hijriyah. Selanjutnya panitia menelusuri jalannya tarikh hijriyah dipadukan dengan jalannya tarikh masehi dengan berpedoman tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah jatuh pada tanggal 16 Juni 622 Masehi. Akhirnya panitia menemukan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah 976 H itu jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M.

Dengan demikian jelas bahwa perkembangan daerah Lamongan sampai akhirnya menjadi wilayah Kab. Lamongan. Sepenuhnya berlangsung pada zaman keislaman dengan Kasultanan Pajang sebagai pusat pemerintahan. Tetapi yang bertindak meningkatkan Kranggan Lamongan menjadi Keb. Lamongan serta yang mengangkat Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama bukanlah Sultan Pajang melainkan Kanjeng Sunan Giri IV. Hal ini disebabkan Kanjeng Sunan Giri juga prihatin terhadap Kasultanan Pajang yang selalu resah dan situasi pemerintahan yang kurang mantap. Didamping itu Kanjeng Sunan Giri juga merasa prihatin dengan adanya ancaman dan ulah para pedagang asing dari Eropa yaitu orang Portugis yang ingin menguasai Nusantara khususnya Pulau Jawa.

b. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan memiliki luasan wilayah kurang lebih 1.812,80 km² setara 181.280 Ha atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur dengan

panjang garis pantai sepanjang 47 km. berikut ini merupakan batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan

1. Sebelah Utara : Laut Jawa,
2. Sebalah Timur : Kab. Gresik,
3. Sebelah Selatan : Kab. Jombang dan Kab. Mojokerto
4. Sebelah barat : Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban.

Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada $6^{\circ} 51' 54''$ - $7^{\circ} 23' 6''$ Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur $112^{\circ} 4' 41''$ - $112^{\circ} 33' 12''$ bujur timur. Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada $6^{\circ} 51' 54''$ - $7^{\circ} 23' 6''$ Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur $112^{\circ} 4' 41''$ - $112^{\circ} 33' 12''$ bujur timur. Wilayah Kab. Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu :

- a. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kec. Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo dan Kembangbahu
- b. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kec. Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro.
- c. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kec. Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

Secara administratif, Kabupaten Lamongan terbagi atas 27 Kecamatan, 12 Kelurahan, 462 Desa. dimana Jumlah Dusun yang ada di Kabupaten Lamongan sebanyak 1.432 Dusun dan Jumlah RT (Rukun Tangga) sebanyak 337.820 Rumah Tangga. Jumlah Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Sambeng yaitu 195,44 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Maduran dengan luas 30,15 Km².



Gambar 3. Peta Kabupaten Lamongan

Sumber : www.lamongankab.go.id :2017

c. Lambang Kabupaten Lamongan

Menurut situs resmi Kabupaten Lamongan, lambang dari Kabupaten Lamongan memiliki 4 bagian utama dimana lima bagian tersebut memiliki arti tersendiri bagi Kabupaten Lamongan baik dari bentuk, susunan lambang, dan warna-warna yang digunakan dalam lambang tersebut.



Gambar 4. Lambang Kabupaten Lamongan

Sumber : www.lamongankab.go.id :2017

Berikut arti dari setiap bagian yang terdapat pada lambang Kabupaten Lamongan:

1. Makna dari 5 (lima) sudut perisai melambangkan dasar yang akan ditaati dan akan dipertahankan oleh masyarakat Lamongan, ialah falsafah dasar Negara Kita Indonesia yakni Pancasila. Karena itu maka sudut 5 (lima) yang melingkari dan merupakan bentuk dari perisai tersebut Falsafah Pancasila yang juga mengandung arti bahwa rakyat daerah Kabupaten Lamongan telah menerapkan ajaran Pancasila dengan tertib dan pasti.
2. Bintang bersudut lima yang memancarkan sinar ke arah lima penjuru melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Keris melambangkan kewaspadaan dan juga bagi mempunyai latar belakang sejarah yang panjang bagi Kabupaten Lamongan.
4. Bukit atau gunung yang tidak berapi melambangkan bahwa Kabupaten Daerah Lamongan mempunyai wilayah yang berupa daerah pegunungan yang merupakan sumber daya alam yang berguna bagi pembangunan.
5. Ikan Lele melambangkan sikap hidup yang ulet, tahan menderita, sabar tetapi bila diganggu berani memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya,
6. Ikan Bandeng melambangkan potensi komoditi baru bagi Kabupaten Lamongan yang penuh harapan di masa yang akan datang.

7. Air yang beriak di dalam tempayang melambangkan bahwa air merupakan masalah utama yang sering terjadi di Kabupaten Lamongan.
8. Tempayang batu melambangkan tempat air bersih yang boleh di ambil oleh siapapun yang memerlukan, dan juga merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Lamongan.
9. Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran rakyat dalam arti kecukupan pangan, sandang, dan lainnya.

Makna Warna-Warna Yang Dipakai Dalam Lambang Kabupaten Lamongan

1. Warna kuning melambangkan dasar mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa yang menyoroti setiap gerak dan usaha Daerah kabupaten Sumenep. Selaras pula dengan dasar pertama dari Pancasila.
2. Warna dasar hijau melambangkan besarnya harapan yang akan datang terhadap cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat kabupaten sumenep.
3. Warna Hitam Sebagai batas tertentu yang melingkari perisai dengan lingkaran melambangkan penyatuan cita-cita masyarakat kabupaten sumenep.
4. Pita dalam perisai ditetapkan berwarna dasar putih dan tulisan dengan warna dasar berwarna merah, melambangkan SANG MERAH PUTIH bendera kita Negara Republik Indonesia.

d. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan

Visi pembangunan Kabupaten Lamongan yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut

VISI

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya** terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing.
2. **Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3. **Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4. **Lebih Berdaya saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui

lima misi sebagai berikut: yakni sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- 2) Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah
- 3) Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
- 4) Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik yang unggul
- 5) Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal

e. Kondisi Topografi dan Geologi

Kondisi Geografis Kondisi topografi Kab. Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0-25 m dengan luas 50,17% dari luas Kab. Lamongan, daratan ketinggian 25-100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m dari permukaan air laut.

Secara fisiografis wilayah Kab. Lamongan bagian utara dan selatan termasuk dalam Zone Rembang (van Bemmelen, 1949) yang disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan, sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randublatung yang kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, namun sebetulnya merupakan suatu depresi (cekungan) yang tertutup oleh endapan hasil pelapukan dan erosi dari batuan yang lebih tua pada

Zone Kendeng dan Rembang. Sejarah geologi Kab. Lamongan diperkirakan dimulai kurang lebih 37 juta Tahun yang lalu (Kala Oligosen). Saat itu wilayah Kab. Lamongan masih berupa lautan (bagian dari Cekungan Jawa Timur). Selanjutnya terjadi proses sedimentasi secara berurutan ke atas berupa penghamparan batuan sedimentasi laut yang kaya unsur karbonatan. Proses ini berlangsung hingga kurang lebih 19 juta Tahun (hingga Kala Polisen). Pada kurang lebih 1,8 juta Tahun yang lalu terjadi aktifitas tektonik (Orogenesa Plio-Pleistosen) yang menyebabkan terangkatnya Kab. Lamongan muncul ke permukaan laut.

f. Kondisi Demografi

Kabupaten Lamongan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 1.354.119 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2012 yaitu 1.182.808 terdiri dari 573.777 jiwa laki-laki dan 609.031 jiwa perempuan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dari tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	2012	643 532	640847	1 284 379
2.	2013	677 024	671 235	1 348 259
3.	2014	670 715	610 983	1 338 800
4.	2015	627 836	669 630	1 342 466
5.	2016	678 196	675 923	1 354 119

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan: Lamongan dalam angka Tahun 2017

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Penggunaan lahan pada Kab. Lamongan terdiri dari penggunaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri

dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, dan kawasan pesisir. ditinjau dari pemanfaatannya, kondisi tata guna tanah Kab. Lamongan Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Kondisi Tata Guna Tanah Kabupaten Lamongan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase
1.	Permukiman	13.030.00	7,19
2.	Sawah Irigasi	45.841.00	25,29
3.	Sawah Tadah Hujan	33.479.00	18,47
4.	Perkebunan	9.919.14	5,47
5.	Hutan	33.717.30	18,50
6.	Hutan Rakyat	7.098.10	3,92
7.	Tambak	1.380.05	0,76
8.	Sungai	8.760.00	4,83
9.	Waduk	8.718.50	4,81
10.	Tegalan/Ladang	12.138.91	0,70
11.	Pertambangan	1.200.00	0,66
12.	Peruntukan Lainnya (rawa,tanah tandus dll)	5.997.00	3,31
Jumlah		181.280.00	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

a. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan beralamatkan di di Jl. Jendral. Suprpto No. 39 Lamongan. Nomor telpon yang bisa dihubungi (0322) 321987. Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Lamongan, selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Eksistensi Dinas Perhubungan dalam perspektif pembangunan di Kabupaten Lamongan pada pokoknya terarahkan sebagai pelaku “GOOD GOVERNANCE”, yang merupakan tuntutan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada stake holder (masyarakat) dan pelaksana institusi pemerintah yang kredibel, maka dinas memiliki tekad untuk memberikan

pelayanan dalam aspek perhubungan dengan mewujudkan “3T” yakni pelayanan perhubungan secara tertib, teratur dan tepat waktu.

b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

1.1 Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yakni:

“Terwujudnya transportasi yang tertib, lancar, dan aman”.

1.2 Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Misi Kabupaten Lamongan Dalam mewujudkan transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman dan murah diperlukan suatu langkah sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, visi tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat dan pelayanan angkutan, penyeberangan, perkeretaapian, serta penyelamatan.*
2. *Meningkatkan Sarana dan Prasarana Tranportasi Laut, Pengawasan Operasional Angkutan, Kepelabuhanan, Penjagaan dan Penyelamatan.*
3. *Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban kegiatan Operasional serta usaha Telekomunikasi dan Informatika.*
4. *Meningkatkan mutu pelayanan teknis administrasi dan sumber daya manusia.*

c. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Menurut Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, Adapun Tujuan yang ingin dicapai capai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan ”.

d. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mempunyai sasaran yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan serta kinerja perencanaan program dan kegiatan
2. Meningkatnya koordinasi internal Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
3. Berkembangnya sarana dan prasarana Perhubungan di Kabupaten Lamongan

e. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

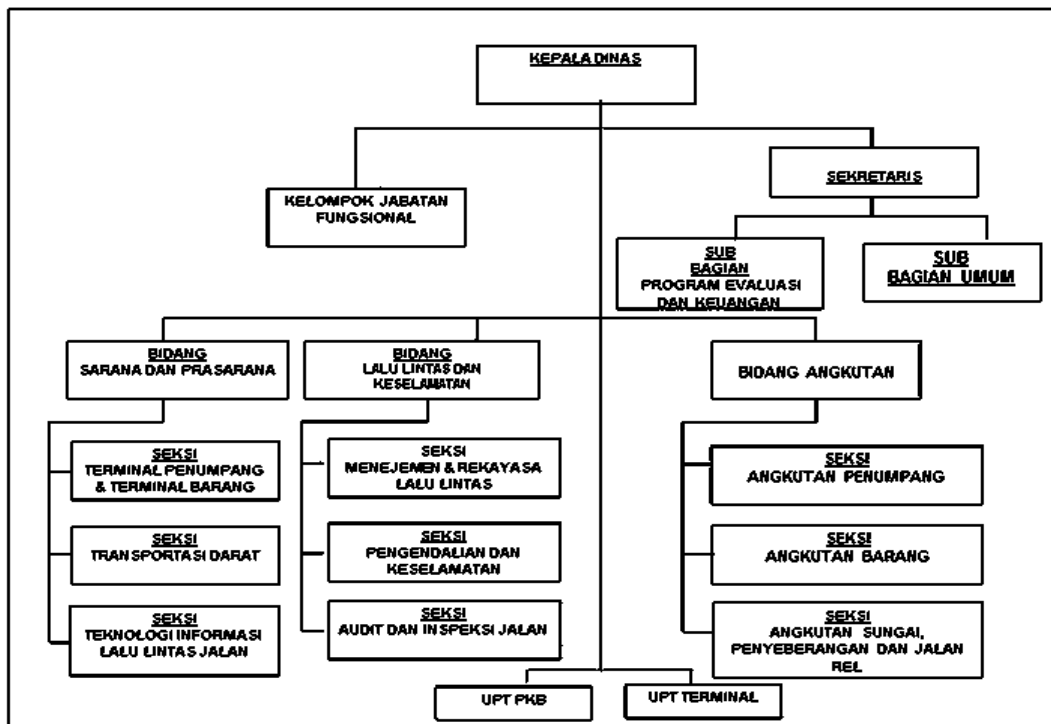
Menurut Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai tujuan ,ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Aparatur;
- b. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasana publik bidang perhubungan
- c. Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan
- d. Meningkatkan keselamatan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- e. Meningkatkan kelaikan pengoperasian dan pengamanan lalu lintas
- f. Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan
- g. Meningkatkan sistem informasi manajemen transportasi

f. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Sarana dan Prasarana ;
 1. Seksi Terminal Penumpang dan Terminal Barang ;
 2. Seksi Transportasi Darat;
 3. Seksi Teknologi Informasi lalu Lintas Jalan.
4. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan;
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 2. Seksi Pengendalian dan Keselamatan;
 3. Seksi Audit dan Inspeksi Jalan;
5. Bidang Angkutan;
 1. Seksi Angkutan Penumpang;
 2. Seksi Angkutan Barang;
 3. Seksi Angkutan sungai, Penyeberangan dan Jalan Rel .



Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
Sumber : Renstra Dishub Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

B. Penyajian Data

1. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan Parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan adalah salah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran

lalu lintas jalan dan upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah Daerah mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Tak terkecuali penyediaan lahan parkir yang memadai. Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi pelayanan jasa parkir di Kabupaten Lamongan yang dirasa masih kurang optimal baik pelayanan, fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal.

Kebijakan parkir belaggaan merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah Kab. Lamongan untuk melakukan penertiban parkir liar dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kab. Lamongan. Hal ini ternyata cukup efektif dalam menunjang pendapatan asli daerah. Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan ini tentunya juga dilaksanakan sesuai dengan Perda Kab. Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan. Peraturan Daerah ini disusun guna menyesuaikan pengaturan Retribusi Parkir Berlangganan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan

untuk penyediaan pelayanan, pengaturan, serta pemanfaatan tempat khusus parkir guna memperlancar lalu-lintas jalan. Peraturan Daerah ini untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan di tempat parkir. Disusun dalam rangka penyederhanaan cara pembayaran retribusi dan penertiban juru parkir sehingga memberikan kemudahan bagi Wajib Retribusi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Berlangganan.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan sebagai prosedur operasional perpajakan yang dimana jasa parkir memiliki tugas dan tujuan untuk mengatur lalu lintas di dalam jasa perpajakan dan telah memiliki prosedur serta tahapan di dalam pelaksanaannya seperti membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan (satu tahun) untuk lokasi parkir yang berlaku.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan menurut Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kebijakan yang dimana mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan masyarakat yang intinya ada hubungan sebab akibat di dalam pelaksanaannya. Kebijakan parkir berlangganan adalah salah satu program pemerintah, sebagai salah satu solusi jitu sistem pengelolaan perpajakan yang ada, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna

jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya parkir yang jauh lebih murah dan hemat. Kebijakan parkir berlangganan merupakan bentuk kebijakan Pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lali lintas jalan raya dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan parkir berlangganan tidak lepas dari kewenangan Daerah didalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mensejahterahkan warganya. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Retribusi parkir ini sangatlah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah otomatis berbicara tentang uang. Pendapatan asli daerah itu penggalinya adalah retribusi pada parkir. Sejak kita berlakukan adanya parkir berlangganan ditambah lagi dengan peningkatan jumlah kendaraan untuk wilayah parkir otomatis pendapatan asli daerah akan bertambah.” (Hasil Wawancara dengan Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Dalam kebijakan tersebut Pemerintah Kab. Lamongan membagi sistem parkir menjadi beberapa sistem yaitu dengan sistem harian dan sistem parkir berlangganan. Kedua sistem itu dilakukan di tempat parkir umum yang dalam hal ini sistem parkirnya dikelola oleh pemerintah. Untuk tempat parkir khusus dapat dikelola oleh pemerintah, perorangan atau badan hukum sedangkan tempat parkir insidentil bisa dilaksanakan atas ijin Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum. Parkir berlangganan merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab. lamongan adapun tujuannya untuk pelayanan kepada masyarakat

yang lebih inovatif dan juga peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir berlangganan. Adapun dasar hukum dari kebijakan parkir berlangganan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 6 Tahun 2004 Tanggal : 2 Desember 2004 Tentang : Pengelolaan Retribusi Parkir
- b. Perda Kab. Lamongan Nomor: 15 Tahun 2010 Tanggal : 11 November 2010 Tentang : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 22 Tahun 2004 Tanggal : 31 Desember 2004 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Lamongan No. 6 Tahun 2004
- c. SK. Gub. Prop. Jatim No. 47 Tahun 2011 Tentang : Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dengan Pemerintah kabupaten / Kota di Jawa Timur.
- d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Lamongan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan POLRES Lamongan Nomor: 181.1/1/413.013/2012 970/57/120.22/ 2012 B/1986/16/2012 Tentang : Pelaksanaan Pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kab. Lamongan

Sistem pembayaran parkir berlangganan cukup mudah dan cepat prosesnya masuk ke kas daerah. Pembayaran parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan menggunakan sistem “*notice*” langsung pada STNK pemberian stiker atau kartu parkir berlangganan ketika pengurusan pajak tahunan kendaraan bermotor oleh setiap wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Lamongan dan

kemudian SAMSAT Lamongan langsung menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim. Sedangkan parkir harian dimana pengguna jasa parkirnya adalah kendaraan bermotor dengan plat nomor di luar daerah lamongan langsung membayar kepetugas parkir. petugas parkir yang menerima bayar dari pengguna jasa parkir harian dalam hari itu langsung menstorkan kepada petugas dari Dinas Perhubungan Kab. Lamongan dan segera menyetorkan ke Dinas perhubungan. Uang parkir yang terkumpul di Dinas Perhubungan Kabupaten lamongan akan disetorkan langsung ke PEMDA Lamongan.

Dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah, kebijakan parkir berlangganan dinilai telah sangat berkontribusi melalui pencapaian target yang semakin meningkat tiap tahunnya dan keadaan ini sangat mendorong pemasukan Pemerintah Kabupaten Lamongan dari sektor retribusi parkir. Pencapaian targetnya dapat dilihat pada tabel Target Retribusi Parkir (sebelum dan sesudah pelaksanaan parkir berlangganan) Mulai Tahun 2004 - Agustus 2013

Tabel 4
Target Retribusi Parkir (sebelum dan sesudah pelaksanaan parkir
berlangganan) Mulai Tahun 2004 s/d Agustus 2013

No	Tahun	Roda Dua	Roda Empat	Target PAD Parkir	Realisasi PAD Parkir
1	2004	119.012	8.271	Rp 300.000.000,-	Rp 300.000.000,-
2	2005	124.833	8.853	Rp 1.975.000.000,-	Rp 2.850.780.000,-
3	2006	136.106	9.103	Rp 2.550.000.000,-	Rp 3.056.240.000,-
4	2007	148.405	9.565	Rp 3.067.040.000,-	Rp 3.350.700.000,-
5	2008	160.640	9.854	Rp 3.600.000.000,-	Rp 3.606.960.000,-
6	2009	191.912	11.993	Rp 3.825.000.000,-	Rp 4.317.960.000,-
7	2010	206.052	12.833	Rp 4.100.000.000,-	Rp 4.634.360.000,-
8	2011	220.789	14.556	Rp 5.055.000.000,-	Rp 4.998.020.000,-
9	2012	243.323	16.773	Rp 5.462.000.000,-	Rp 5.535.560.000,-
10	Agustus 2013	171.556	12.128	Rp 5.771.240.000,-	Rp 6.135.960.000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, UPT Menrek -2017

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan selaku organisasi pelaksana melakukan beberapa strategi yang berhubungan dengan sistem pengelolaan perparkiran yang ada, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya parkir yang jauh lebih murah dan hemat. mulai dari persiapan sumber daya manusia dengan memberi pembekalan juru parkir. mempersiapkan sistem di dalam Dinas Perhubungan Kab. Lamongan sendiri, mempersiapkan sistem juga yang tiap tahunnya mengalami penyempurnaan. Berinovasi dengan membuat sistem online dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan dimana *notice* pembayarannya langsung melekat pada notice pajak kendaraan yang harus dibayarkan tiap tahunnya. Dinas Perhubungan Kab. Lamongan juga melakukan strategi pendekatan kepada masyarakat dengan bersosialisasi ke desa-desa dan juga melakukan SAMSAT keliling yang bekerjasama dengan instansi lain dalam langkah jemput bola dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Di luar itu Dinas Perhubungan Kab. Lamongan juga memberikan *reward* kepada pengguna jasa parkir berlangganan dengan mengadakan undian dari kupon parkir berlangganan untuk menarik animo masyarakat yang ada di Kab. Lamongan.

Sebelum kebijakan ini diberlakukan pendapatan dari sektor retribusi parkir hanya mencapai Rp 300.000.000,- per tahunnya, sedangkan dengan diberlakukan kebijakan parkir berlangganan yang dilaksanakan secara efektif oleh Dinas Perhubungan Kab. Lamongan sebagai pelaksananya menghasilkan pendapatan asli daerah di sektor retribusi parkir pada tahun berikutnya sebesar Rp

6.135.960.000,-, dimana dapat dikatakan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan parkir berlangganan ini secara efektif maka akan terjadi peningkatan pendapatan. Karena semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor di Kab. Lamongan maka semakin meningkat pula pendapatan dari sektor parkir sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Bisa dikatakan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan parkir berlangganan di Kab. Lamongan, peningkatan pendapatan asli daerah di sektor retribusi parkir mengalami peningkatan tiap tahunnya karena peningkatannya juga seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kab. Lamongan.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh Pemda sebagai prosedur operasional perpajakan yang dimana jasa parkir memiliki tugas dan tujuan untuk mengatur lalu lintas di dalam jasa perpajakan dan telah memiliki prosedur serta tahapan di dalam pelaksanaannya seperti membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan (satu tahun) untuk lokasi parkir yang berlaku. Serta implementasi parkir berlangganan ini merupakan sebuah kebijakan yang dimana mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan masyarakat yang intinya ada hubungan sebab akibat di dalam pelaksanaannya. Kebijakan parkir berlangganan adalah salah satu program pemerintah, sebagai salah satu solusi jitu sistem pengelolaan perparkiran yang ada, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan

mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya parkir yang jauh lebih murah dan hemat. Kebijakan parkir berlangganan merupakan bentuk kebijakan Pemda dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lali lintas jalan raya dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan parkir berlangganan tidak lepas dari kewenangan Daerah didalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya Pemda dalam mensejahterahkan warganya

Terkait dengan proses pengimplementasian kebijakan parkir berbayar yang ada di Kab. Lamongan, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. suatu kebijakan tentu harus diimplementasikan agar dampak atau tujuan adanya kebijakan dapat tercapai dimana kebijakan hanya akan menjadi sebuah catatan diatas kertas apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam proses pengimplementasian kebijakan publik terdapat beberapa model yang dapat digunakan satu diantaranya menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III menyatakan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini dapat dijelaskan masing-masing variabel yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Lamongan

a. Komunikasi

Komunikasi dalam proses implementasi membutuhkan mekanisme dan

prosedur institusioanal yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam komunikasi pesan-pesan disampaikan dan juga berbagai informasi terkait pelaksanaan dari suatu kebijakan. Komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan kesalahpahaman yang menimbulkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan baik. Komunikasi dilakukan antar sesama implementor atau badan pelaksana kebijakan dan juga komunikasi kepada kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi, semua pelaksana sudah seharusnya memahami dan mendukung apa yang menjadi tujuan kebijakan. Faktor kepemimpinan sangat berperan dalam mengatur bawahannya atau implemntor memmunyai pemahaman dan dukungan terhadap tujuan dari organisasi.

Selain komunikasi yang dilakukan dengan sesama implementor atau badan pelaksana di Kabupaten Lamongan, implementor juga melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat luas. Komunikasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan diberlakukannya kebijakan parkir berbayar serta besaran yang harus dibayarkan oleh masyarakat dalam memanfaatkan jasa parkir berlangganan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan terkait dengan penyelenggaraan retribusi parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan, Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa

komunikasi yang terjalin selama ini antara Dinas Perhubungan, pihak swasta sebagai pihak ketiga, maupun dengan pihak kepolisian yakni satuan Lalulintas Polres Lamongan telah berjalan dengan sangat bagus dimana sebagai SKPD yang bertanggung jawab didalam memonitoring berjalannya kebijakan retribusi berlangganan, Dinas Perhubungan juga berkomunikasi dengan pihak swasta yang berperan sebagai penyedia petugas parkir maupun pihak satuan lalu lintas polres Lamongan dalam menggelar operasi penertiban terhadap kegiatan parkir liar maupun petugas parkir liar yang tidak terdaftar di dinas perhubungan kabupaten lamongan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau.

“Sangat baik ya mas dalam hal komunikasi karena sebagai satuan kerja yang ditunjuk tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita selalu berkomunikasi dengan pihak swasta dimana mereka bertindak sebagai penyedia petugas parkir serta pihak satuan lalulintas dari polres Lamongan yakni dengan menggelar operasi gabungan didalam menertibkan tempat parkir maupun petugas parkir yang tidak tercatat di Dinas Perhubungan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Kejelasan isi pesan yang disampaikan akan sangat mempengaruhi penerima pesan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari program. Karena pesan yang jelas atau tidak samar-samar akan menghindari penafsiran menyimpang dari yang dimaksudkan. Selain itu juga harus memperhatikan aspek konsistensi. Suatu pesan yang disampaikan haruslah konsisten, karena jika pesan yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima pesan. Dimana pesan tersebut haruslah mempunyai kesesuaian antara apa yang diberikan oleh pengirim pesan dengan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan dan dengan

yang disampaikan oleh media lain (media cetak dan elektronik).

Dalam penyelenggaraan parkir berlangganan yang telah diatur dalam Perda Kab. Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan yang ada di Kab. Lamongan, komunikasi program ini menggunakan berbagai media cetak dan elektronik. Bapak Tony Ariantoro, SAP. MM selaku Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas Mengungkapkan bahwa penyampaian informasi serta pesan kepada masyarakat, setiap dinas yang ada di Kabupaten Lamongan, saling bahu membahu melengkapi informasi melalui media cetak seperti Koran (Jawa Pos, Kompas, dan sebagainya), Spanduk atau banner yang dipasang di depan Rumah Sakit, di jalan-jalan strategis maupun tempat umum. Berikut ini peneliti juga menampilkan kegiatan pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Lamongan bersama dengan pihak satuan lalulintas kab. Lamongan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan parkir berlangganan disekitaran tempat perbelanjaan yang ada di Jalan Basuki Rahmat maupun disekitaran area parkir yang ada di RSUD Dr. Soegiri Kab. Lamongan.



Gambar 6 Pemasangan Spanduk dan Banner tentang Parkir berbayar oleh Petugas Dishub dan Satlantas Polres Lamongan

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

Disamping itu komunikasi juga disampaikan melalui sosialisasi, rapat dengar pendapat antar institusi penyelenggara Parkir Berlangganan maupun dengan setiap SKPD yang ada di Kabupaten Lamongan untuk ikut ambil bagian didalam menjalankan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tony Ariantoro, SAP. MM selaku Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas

“Sangat baik ya mas dalam hal komunikasi karena sebagai satuan kerja yang ditunjuk tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita selalu berkomunikasi dengan pihak swasta dimana mereka bertindak sebagai penyedia petugas parkir serta pihak satuan lalulintas dari polres Lamongan yakni dengan menggelar operasi gabungan didalam menertibkan tempat parkir maupun petugas parkir yang tidak tercatat di Dinas Perhubungan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Tony Ariantoro, SAP. MM selaku Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09.15 WIB di ruang kerja Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Dinas Perhubungan Kab. Lamongan sebagai Dinas pelaksana kebijakan parkir berlangganan saat ini berupaya untuk memberikan penyuluhan bagaimana seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), masyarakat umum maupun para petugas parkir mampu menerapkan pelayanan parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kendaraan yang ada di Kab. Lamongan secara efektif dan maksimal. Hal tersebut bisa terlaksana apabila masyarakat terdaftar sebagai pengguna parkir berlangganan yang menggunakan nomor kendaraan plat S (Lamongan). Seperti yang diutarakan oleh masyarakat mengenai pendapatnya tentang komunikasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan Kab. Lamongan dengan masyarakat yakni;

“Menegenai parkir berlangganan, kami telah mendapatkan informasi dari Dinas Perhubungan melalui spanduk yang mereka pasang bahwa dilaksanakan mekanisme parkir berlangganan di Kabupaten lamongan. Itu baik agar masyarakat seperti kami ini tidak ketinggalan informasi sehingga kami bisa menggunakan kebijakan ini dengan benar.”(Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Setioaji selaku masyarakat pengguna lahan parkir di Pasar Lamong Raya Pada tanggal 18 Juni pukul 15.24)

Penyelenggaraan Kegiatan parkir berlangganan dan penerimaan pajak yang bersumber dari kegiatan parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan, tidaklah semata-mata untuk mengejar pemasukan PAD, tetapi yang tidak kalah pentingnya yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan refresentatif sebagai salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga Lamongan. Petugas Parkir sebagai stakeholder dalam kebijakan ini juga harus dapat memahami tentang kebijakan yang telah diberlakukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan. Berikut wawancara dengan salah seorang petugas parkir yang berlokasi di RSUD Lamongan.

“Begini mas, kami ya diberitahu oleh orang dinas bahwa adanya kebijakn tentang parkir berlangganan ini. Ya kami mau tidak mau harus tunduk dan menjalankan aturan tersebut. Kami juga disosialisai mengenai mekanisme kebijakan tersebut.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Rudy Selaku Petugas Parkir yang berlokasi di RSUD Lamongan pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 14.22 WIB)

Pertanggung jawaban petugas parkir berlangganan akan sistim keamanan dan pengelolaan retribusi parkir yang menerapkan asas Akuntabilitas dan Transparansi telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengingat pelayanan, kenyamanan ,penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir berlangganan serta kepercayaan masyarakat terhadap Dinas

Perhubungan Lamongan dalam hal mengelola pendapatan retribusi Parkir berlangganan. Adapun alur-alur yang harus dipenuhi oleh masyarakat kabupaten lamongan didalam mengurus kartu parkir berlangganan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat bisa datang secara langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dengan membawa STNK kendaraan ataupun dapat mengurusnya ketika pembayaran pajak kendaraan di kantor SAMSAT atau SAMSAT keliling.
2. Ketika telah menunjukan STNK, petugas SAMSAT ataupun petugas Dishub langsung mencatatkan kode kendaraan yang nantinya akan dicantumkan pada karcis ataupun pada kartu parkir berlangganan selama 1 tahun dengan besaran biaya yang telah disesuaikan dengan jenis kendaraan yang dimiliki.
3. Pada saat itu juga masyarakat dapat memperoleh karcis atau kartu parkir berlangganan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan ataupun melalui kantor SAMSAT Kabupaten Lamongan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan bahwa besaran harga yang harus di bayar oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk parkir berlangganan dan parkir harian adalah sebagai berikut:

1. Parkir harian
 - a. Untuk kendaraan bermotor JBB > 3.500 Kg (bus, truk, mobil barang, atau kendraan sejenisnya) sebesar Rp 2.500,- per satu kali parkir.
 - b. Untuk kendaraan bermotor JBB < 3.500 Kg (mini bus, mini truk, pick up, pick up box, MPU, atau kendaraan sejenisnya) sebesar Rp 1.500,- per satu kali parkir.
 - c. Untuk kendaraan / mobil pribadi (colt station wagon, station

wagon, jeep dan kendaraan sejenisnya) sebesar Rp 2000,- per sekali parkir.

- d. Sepedah motor sebesar Rp 500,- per satu kali parkir. E. Sepedah atau kendaraan tidak bermotor Rp 200,- per satu kali parkir.

2. Parkir Berlangganan

- a. Mobil Penumpang Umum, bus, truk, pick up, pick up box, angkutan khusus sebesar Rp 40.000,- Per tahun
- b. Sepeda motor sebesar Rp 20.000,- per tahun.

Menurut Ibu Suryani Indarti, SE selaku Kasubag Umum mengemukakan bahwa komunikasi yang dibangun dalam memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik ditingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dengan melibatkan masyarakat, para petugas parkir, pihak sataun lalulintas maupun para pemangku di masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Lamongan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Bentuk komunikasi yang kita lakukan dalam memberikan informasi tentang parkir langganan selalu kita lakukan dengan melibatkan masyarakat, masing-masing SKPD, pihak kepolisian serta para petugas juru parkir yang memang telah terdaftar di dishub. Ini kita lakukan sebagai bentuk pemberian informasi untuk mengurangi adanya penolakan ataupun protes yang dilakukan atas diberlakukannya perda Nomor 15 tahun 2010.” (Hasil Wawancara dengan Ibu Suryani Indarti, SE selaku Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09.15 WIB di ruang kerja Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Berikut ini peneliti juga menampilkan kegiatan sosialisasi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan atas kerjasama pihak Dinas Perhubungan dan Pihak

Satlantas Polres Lamongan Bagi SKPD yang ada di Kabupaten Lamongan, masyarakat maupun bagi para petugas parkir.



Gambar 7 Kegiatan Sosialisasi Bagi Petugas Jukir maupun SKPD di Kabupaten Lamongan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2017

Menanggapi pendapat dari Ibu Suryani Indarti, SE selaku Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Bapak Muhamad Sobandi selaku masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan juga mengungkapkan bahwa pada awal penerapan parkir berlangganan beliau tidak mengalami kebingungan lagi sebab sebelum parkir berlangganan diberlakukan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Lamongan, beliau telah mendapatkan informasi implementasi dari kebijakan parkir berlangganan melalui radio udara maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan di kantor Kecamatan Sukodadi yang digelar oleh Dinas perhubungan dan pihak satuan lalulintas Polres Lamongan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Ia memang benar mas, jadi sebelum parkir berlangganan mulai berlaku saya sebelumnya sudah dapat beritanya dari radio dan memang waktu itu saya pernah juga ke kantor camat untuk ikut sosialisasi dari dinas perhubungan dan polisi tentang parkir berlangganan yang memang lebih bagus dan tidak ribet kayak sebelum-sebelumnya.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Muhamad Sobandi selaku masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan, pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 16.15 WIB di Kompleks Ruko Basuki Rahmat, Lamongan)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, implementasi kegiatan parkir berlangganan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lamongan mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana dalam setiap tahunnya sejak diimplementasikan kebijakan retribusi parkir berbayar, peningkatan PAD mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan sebelum Kebijakan Parkir berlangganan diimplementasikan. Keberhasilan dalam proses pengimplementasian dari kebijakan parkir berlangganan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan tidak lepas juga dari adanya komunikasi yang baik dari setiap pemangku kebijakan didalamnya yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Pihak Satuan Lalulintas Polres Lamongan, masing-masing SKPD di Kabupaten Lamongan, para petugas jukir yang ditugaskan serta masyarakat Lamongan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia, dana (anggaran) diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran maupun peralatan yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas dimana kondisi ini dapat menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Dalam menunjang kegiatan pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Lamongan, Dinas Perhubungan Kab. Lamongan tidak hanya ditunjang oleh sumberdaya manusia tetapi juga ditunjang oleh sumberdaya anggaran. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kab. Lamongan dalam pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1.1 Sumberdaya Manusia

Berbicara tentang organisasi sama halnya berbicaranya tentang aspek kelembagaan yang didalamnya termasuk kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kondisi sumberdaya manusia atau aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan Jenis pendidikan serta jumlah pegawai maupun para petugas parkir sebagai tenaga kontrak yang terlibat dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5 Jumlah Pegawai Dishub dan Petugas Parkir Lamongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Dinas Perhubungan			Petugas Parkir	
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	9	S2	-
2.	S1	15	S1	-
3.	SMA	26	SMA	14
4.	SD	-	SD	75
TOTAL		50	TOTAL	89

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2017

Berdasarkan data pada tabel 8 terkait dengan Jumlah pegawai Dishub dan petugas parkir lamongan dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan

parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan dapat dikatakan bahwa jumlah dari pegawai dinas perhubungan yang ada saat ini justru tidak sebanding dengan jumlah petugas parkir yang bertindak sebagai tenaga kontrak didalam mengawasi kegiatan parkir di lapangan. Belum lagi jumlah pegawai pada dinas perhubungan justru lebih banyak dari dari petugas yang hanya berlatarbelakang pendidikan di tingkat SMA yakni 26 orang dibandingkan dengan para petugas Dishub yang merupakan lulusan S1 yang hanya berjumlah 15 orang maupun S2 yang hanya berjumlah 9 orang. Hal ini juga yang diungkapkan oleh Ibu Suryani Indarti, SE selaku Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Beliau mengungkapkan bahwa keterbatasan dari jumlah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu faktor penentu didalam proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang mana jumlah pegawai dari lulusan SMA masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai Dishub dengan lulusan S1 maupun S2. Keterbatasan pada jumlah aparatur Dishub Lamongan membuat kontrol akan keberlangsungan kebijakan parkir berlangganan tidak dapat dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun kualitas dari aparatur Dishub Lamongan masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Sebagai dinas yang ditunjuk sebagai penanggungjawab, kita selalu berusaha semaksimal mungkin walaupun jumlah pegawai maupun tingkat pendidikan masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada, itu sebabnya kita libatkan para petugas parkir yang merupakan tenaga kontrak atas hasil kerjasama bersama pihak swasta, kita sebai dinas hanya sebatas memonitoring sejauh mana pelaksanaan dari kegiatan retribusi berlangganan dilapangan” (Hasil Wawancara dengan Ibu Suryani Indarti, SE selaku Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09.15 WIB di ruang kerja Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Berikut ini peneliti juga menampilkan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan tidak hanya bagi para pegawai UPT Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Dishub Lamongan saja melainkan juga kegiatan pelatihan bagi para petugas parkir yang ada di Kabupaten Lamongan.



Gambar 8 Kegiatan Pelatihan Bagi Petugas Jukir dan Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2017

UPT Manajemen dan Rekayasa Lalulintas (Menrek) pada Dinas Perhubungan dalam proses pengimplementasian kebijakan retribusi berlangganan merupakan salah satu sarana organisasi pendukung untuk membantu pelaksanaan penggalan potensi PAD yang dikepalai oleh Bapak Tony Ariantoro, SAP.MM. Bapak Tony Ariantoro, SAP.MM menuturkan bahwa didalam menutupi

kekurangan dari SDM dari aparaturnya Dishub agar mampu memonitoring pelaksanaan dari kebijakan parkir berlangganan, Dishub Lamongan dalam setiap tahun anggaran selalu mengadakan pelatihan maupun peningkatan kapasitas bagi setiap pegawainya baik ditingkat atas maupun hingga tingkat terendah yang tidak hanya dilakukan di daerah lamongan saja melainkan melalui kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan yang ada luar daerah Lamongan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas dari sumberdaya aparaturnya yang ada sekaligus sebagai bahan perbaikan dari kegiatan yang telah dijalankan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Harus kita akui bahwa hingga sejauh ini sumberdaya yang terlibat dalam memonitoring pelaksanaan perda masih sangat kurang memadai dari segi kapasitas maupun kualitas. Sebagai langkah perbaikan, kita selalu adakan pelatihan baik yang dilakukan didalam maupun ke luar daerah. ini tentu dapat dijadikan sebagai ajang perbaikan dan peningkatan kemampuan dari setiap aparaturnya khususnya yang bertugas di UPT Menrek Dishub Lamongan” (Hasil Wawancara dengan Bapak Tony Ariantoro, SAP. MM selaku Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09.15 WIB di ruang kerja Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Selain itu sebagai sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan penerima kebijakan, petugas parkir juga diberi arahan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan mulai dari persiapan sumber daya manusia dengan memberi pembekalan juru parkir. Berikut wawancara dengan petugas parkir yang berlokasi di Pasar Lamong Raya.

“Kami sebagai juru parkir ini yang langsung berhubungan dengan para masyarakat ya harus mengetahui tentang seperti kendaraan apa saja yang

mendapatkan karcis berlangganan dan kartunya seperti apa. Oleh karena itu , kami mengikuti sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tersebut sehingga tidak ada lah paham begitu mas.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Mariono selaku petugas parkir di Pasar Raya Lamong, pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 13.15 WIB)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam menggerakan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang fungsinya adalah menggerakan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Sumberdaya yang terlibat baik dalam merencanakan maupun mengimplemetasikan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan tidak hanya melibatkan petugas dinas perhubungan ataupun petugas UPT (Manajemen Rekayasa Lalulintas (Menrek) Dishub saja melainkan juga melibatkan peran dan fungsi dari para tenaga kontrak yang bertugas di 89 titik parkir berlangganan yang telah ditetapkan oleh dinas perhubungan. Sebagai upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta kuantitas dari setiap SDM yang ikut ambil bagian didalam proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan, Dishub Kabupaten Lamongan juga selalu menganggarkan kegiatan pelatihan maupun peningkatan kapasitas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang ingin dicapai didalam proses pengimplementasian dari kebijakan parkir berlangganan yakni meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) disetiap tahunnya dari sektor pajak yakni retribusi parkir kendaraan dapat tercapai secara efektif dan maksimal. tujuan kebijakan parkir berlangganan Kabupaten Lamongan dapat dilihat jelas bahwa tujuan utamanya adalah peningkatan pemasukan daerah dari

upaya pengoptimalan penggalan sumber pemasukan yang besar dalam pengelolaan yang baik yaitu dengan cara menjalankan kebijakan parkir berlangganan. Karena dengan menjalankan kebijakan parkir berlangganan setiap wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya tiap tahunnya sudah juga termasuk membayar parkir berlangganan. Dengan sistem itulah pendapatan dari sektor retribusi parkir tidak terjadi kebocoran.

1.2 Sumberdaya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, yang tersedia maka proses implementasi dilapangan akan lebih mudah dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia lebih sedikit maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Ketersediaan dana dalam mendukung keberlangsungan dari setiap kegiatan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana Dana sangat berpengaruh terhadap penggunaan strategi dan cara-cara dalam implementasi kebijakan sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka cara-cara dan strategi implementasi akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang tersedia kurang, cara-cara atau strategi implementasi kebijakan akan menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia dengan kata lain implementasi menyesuaikan jumlah dana yang tersedia.

Menurut wawancara peneliti bersama dengan Bapak Toyibatul Af'al selaku kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

mengemukakan bahwa hingga saat ini ketersediaan dana sudah tidak menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan sebab setiap kegiatan yang dijalankan mendapatkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ketersedian sumber daya finansial atau sarana prasarana yang mencukupi akan mendukung suatu keberhasilan kebijakan dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan dapat diandalkan akan sangat menentukan keberhasilan program. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Untuk masalah pembiayaan dari pengaturan retribusi kendaraan secara berlangganan tentu bersumber sepenuhnya dari APBD Lamongan itu sebabnya hingga sejauh ini kita belum menemukan masalah terkait dengan keterbatasan anggaran didalam menjalankan aturan parkir berlangganan. Kalau adapun saya kira sangat kecil ya mas kekurangannya sebab setiap dana yang dianggarkan tentu harus berpatokan juga pada ketersediaan anggaran” (Hasil Wawancara dengan Bapak Toyibatul Af'al selaku Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.44 WIB di ruang kerja Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Pendapat Bapak Toyibatul Af'al selaku Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan juga ditambahkan oleh Bapak A. Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. beliau mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, dana yang digunakan memang bersumber dari APBD Lamongan dimana hal ini memang telah diatur didalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Keseluruhan anggaran yang kita gunakan dalam menjalankan kebijakan yang diatur dalam perda Nomor 15 tahun 2010 secara keseluruhan bersumber dari APBD dimana sejak awal pelaksanaan, kita belum mendapatkan kendala yang berarti untuk ketersediaan anggaran sebab setiap kegiatan yang kita susun telah kita sesuaikan dengan berapa besar anggaran yang nantinya diberikan kepada dinas perhubungan.” (Hasil Wawancara dengan Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumberdaya anggaran ikut menjadi penentu dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Ketersediaan dana dalam mendukung keberlangsungan dari setiap kegiatan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana Dana sangat berpengaruh terhadap penggunaan strategi dan cara-cara dalam implementasi kebijakan sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka cara-cara dan strategi implementasi akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang tersedia kurang, cara-cara atau strategi implementasi kebijakan akan menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia dengan kata lain implementasi menyesuaikan jumlah dana yang tersedia.

Dalam proses pengimplementasian kebijakan terkait dengan kegiatan parkir berlangganan, sumber dana dari kegiatan secara keseluruhan berasal dari APBD Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerah melalui dinas perhubungan kabupaten lamongan hingga sejauh ini belum menemukan hambatan yang berarti terkait dengan anggaran sebab berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua narasumber diatas mengungkapkan bahwa proses penyusunan kegiatan yang ada dalam kegiatan pengimplementasian kebijakan

retribusi berbayar disusun berdasarkan jumlah anggaran yang ada. hal ini memungkinkan setiap kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran dapat dilaksanakan secara penuh tanpa dihadapkan dengan persoalan akan terbatasnya anggaran.

c. Disposisi

Pelaksanaan sebuah kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila pelaksana atau implementor dari kebijakan itu sendiri memiliki komitmen dan konsisten terhadap aturan main yang berlaku. fokus utama dari studi implementasi adalah persoalan tentang bagaimana organisasi berperilaku, atau bagaimana orang berperilaku dalam mencapai tujuan organisasi. kecenderungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkah laku dari pelaksana program yaitu petugas lapangan apakah mendukung atau bertentangan dengan program yang mereka sampaikan.

Terkait dengan implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksana kebijakan yang dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aparatur dinas perhubungan maupun para tenaga kontrak yang bertindak sebagai juru parkir dinilai oleh sebagian masyarakat lamongan masih belum mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya khususnya para petugas parkir. Bapak Nuryanto Wahid selaku masyarakat kota lamongan menuturkan bahwa meskipun kebijakan retribusi parkir telah ditetapkan dengan dasar hukum yang jelas yakni melalui Perda Nomor 15 tahun 2010, namun hingga kini masih saja ada juru parkir yang melakukan meminta uang parkir walaupun dirinya telah menunjukkan karcis parkir

berlangganan kepada juru parkir. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Kan sudah jelas ya mas ini sudah ada Perda yang dikeluarkan tentang parkir tapi sepertinya sama saja sih saya lihat, soalnya walaupun saya sudah menunjukkan karcis parkir gratis, penjaga parkir tetap saja meminta uang parkir dengan alasan tempat parkir ini tidak termasuk daerah parkir berlangganan”.(Hasil Wawancara dengan Bapak Nuryanto Wahid selaku masyarakat kota lamongan, pada tanggal 7 Agustus 2017 pukul 15.25 WIB di Ruko Otik Raya, Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kabupaten Lamongan)

Pendapat Bapak Nuryanto Wahid terkait dengan sikap para petugas parkir juga ditambahkan oleh Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat Kabupaten Lamongan yang diwawancarai oleh peneliti. Beliau menjelaskan bahwa para juru parkir tidak akan meminta uang parkir ketika petugas dinas perhubungan yang ikut mengawasi. Tetapi jika petugas dinas perhubungan telah selsai jam kerjanya, para petugas parkir akan mulai meminta uang parkir meskipun para pemilik kendaraan telah menunjukkan karcis parkir secara gratis. Beliau menambahkan juga bahwa pihak dinas perhubungan harus secara rutin melakukan pengawasan kepada setiap petugas parkir yang melakukan pungutan dan tegas untuk memberikan sanksi apabila ada petugas parkir yang tetap meminta uang parkir meskipun pemilik kendaraan telah menunjukkan karcis parkir berlangganan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Seharusnya petugas Dishub harus ada pengawasan dan tegas kalau ada petugas parkir yang meminta uang parkir padahal sudah ditunjukan karcis parkir gratis. Kalau ada petugas dishub ya mereka enggak mungkin minta uang parkir tapi kalau petugas dishub sudah enggak ada baru mereka mulai narik duit dari parkir padahal sudah ada karcis parkir gratis”.(Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Waluyo selaku masyarakat kota lamongan, pada tanggal 29 Juni 2017 pukul 14.55 WIB di depan pasar sidoharjo, Jalan Pahlawan, Kabupaten Lamongan)

Seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Cahyo Santoso selaku pemilik Toko Kali Kuning yang menjadi salah satu lahan parkir berkarcis langganan bahwa kurangnya komitmen oleh petugas parkir ini dapat mempengaruhi tingkat stabilisasi sebuah bisnis. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

Begini ya mas, komitmen dari petugas parkir ini harus diperhatikan oleh Dishub sendiri melalui pengawasan yang baik. Misalkan para petugas parkir ini tetap menarik biaya parkir , orang pun akan enggan datang ke toko kami dan mencari toko atau lahan parkir lain yang bebas biaya parkir. ”.(Hasil Wawancara dengan Bapak Cahyo Santoso Pemilik toko Kali Kuning Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 11.05 WIB)

Menanggapi pendapat Bapak Nuryanto Wahid, Bapak Agung Waluyo, dan Bapak Cahyo Santoso terkait dengan sikap para petugas parkir yang belum patuh terhadap aturan terkait dengan proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan, Bapak Chairil ST selaku Kasi audit dan inspeksi jalan menjelaskan bahwa hingga sejauh ini beliau telah mendapatkan beberapa keluhan terkait dengan adanya pungutan dari petugas juru parkir yang masih melakukan pungutan terhadap pemilik kendaraan meskipun para pemilik kendaraan tersebut telah menunjukkan karcis parkir berlangganan. Untuk itu pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi kekurangan melalui kegiatan evaluasi berdasarkan keluhan dari masyarakat terkait dengan sikap petugas parkir yang belum mampu menjalankan tugasnya di lapangan. Beliau menghimbau agar apabila ada masyarakat lamongan yang merasa telah memiliki karcis parkir berlangganan namun tetap dimintai uang parkir oleh petugas parkir maka beliau menghimbau untuk segera melapor ke kantor dinas dengan menunjukkan besaran tagihan parkir maka dinas perhubungan kabupaten lamongan akan memberikan

uang ganti rugi kepada masyarakat sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000) ataupun masyarakat dapat langsung segera melapor ke kantor polisi sebab tindakan semacam ini merupakan tindakan melanggar hukum yaitu dengan melakukan pungutan liar. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Kita sudah mendapatkan beberapa keluhan dari masyarakat terkait dengan masih adanya petugas yang melakukan pungutan terhadap pengendara kendaraan walaupun pengendara telah menunjukan karcis parkir berlangganan. Untuk itu saya menghimbau kepada semua masyarakat yang memanfaatkan parkir gratis apabila masih dimintai uang parkir maka langsung saja melapor ke kantor Dishub dan akan kita ganti uang parkirnya sebesar Rp 50.000 ataupun dapat langsung melapor ke kantor polisi”. (Hasil Wawancara dengan Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Beliau menambahkan bahwa hingga sejauh ini telah banyak petugas parkir yang kontraknya diputus oleh dinas perhubungan sebab didalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dilapangan, para petugas parkir masih tetap melakukan pungutan walaupun sebelumnya telah diberikan teguran dan pembinaan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tidak akan segan-segan melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak apabila ada petugas parkir yang tertangkap melakukan pungutan terhadap pengguna kendaraan bermotor walaupun para penngendara kendaraan telah menunjukan karcis parkir berlangganan. Berikut ini peneliti juga menampilkan kegiatan razia bersama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penertiban petugas parkir yang melakukan pungutan berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat



Gambar 9 Penertiban petugas parkir yang melakukan pungutan di Jalan KH. Hasyim Asyahi oleh Pegawai Dishub Kabupaten Lamongan
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2017

Terkait dengan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan di kabupaten lamongan, peneliti juga mewawancarai bapak Nur Salim yang berprofesi sebagai petugas juru parkir. Beliau mengungkapkan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh para pegawai dinas perhubungan membuat para petugas juru parkir lainnya memanfaatkan keadaan seperti ini untuk melakukan pungutan meskipun para pengendara telah menunjukan karcis parkir berlangganan. Namun beliau sendiri mengakui bahwa dirinya hanya akan meminta uang parkir apabila pengendara tidak menunjukan karcis parkir berlangganan mengingat sanksi apabila ada masyarakat yang melaporkan tindakan pungutan diluar dari prosedur yang ada makanya dirinya bisa terancam diberhentikan oleh dinas perhubungan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Ia sih mas memang masih ada beberapa jukir yang narik uang parkir dari pemilik motor padahal sudah ditunjukan karcis parkir berlangganan. Kalau saya kayaknya enggak mungkin berani soalnya kalau ada yang melapor ke kantor, saya pasti sudah diberhentikan sama orang kantor. Saya paling cuman mau minta uang kalau pemilik motor enggak punya karcis parkir berlangganan”.(Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Salim yang berprofesi sebagai petugas juru parkir, pada tanggal 21 agustus 2017 pukul 10.27 WIB di Toko Kali Kuning Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kabupaten Lamongan)

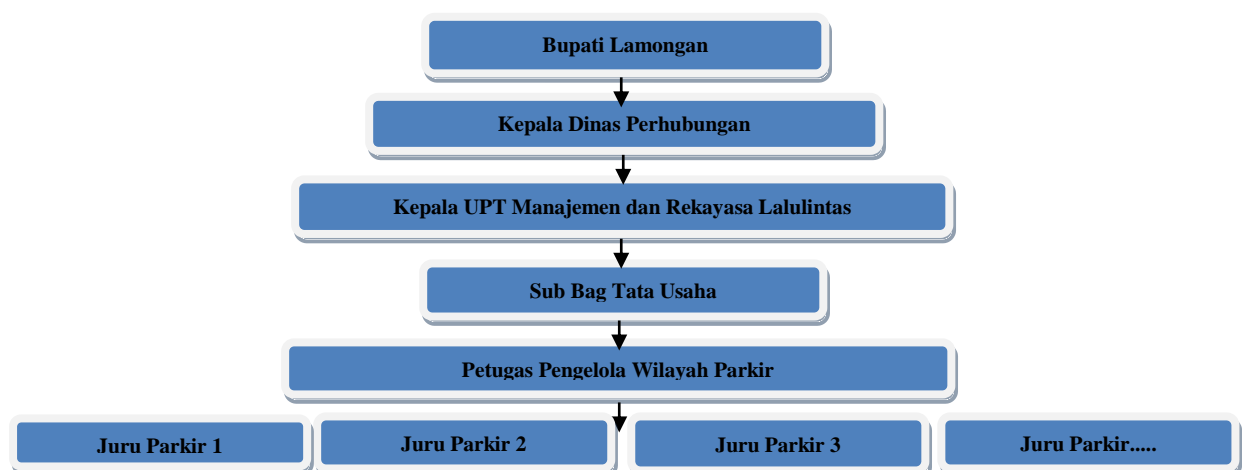
Terkait dengan sikap para petugas juru parkir yang masih melakukan pungutan terhadap para pemilik kendaraan meskipun pemilik kendaraan telah ditunjukkan karcis parkir berlangganan, Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamongan menghimbau agar setiap petugas parkir maupun para aparat dinas perhubungan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan aturan yang berlaku sebab kebijakan parkir berlangganan sevcara keseluruhan akan bermuara pada pendapatan daerah dan pembangunan yang ada di daerah lamongan. Dalam hal pemantauan, beliau berjanji untuk semakin meningkatkan pengawasan terhadap setiap petugas dinas perhubungan maupun kepada para petugas juru parkir agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan serta melakukan observasi dan pengamatan terkait dengan kecendrungan atau sikap dari pelaksana kebijakan didalam mendukung kebijakan Retribusi Parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan, saat ini masih masih belum berjalan secara baik dimana masih terlihat adanya kegiatan pungutan uang parkir yang dilakukan oleh petugas juru parkir kepada setiap pengendara kendaran meskipun para pemilik kendaraan telah menunjukan karcis parkir berlangganan. Selain itu, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh para petugas dinas perhubungan perlu ditingkatkan lagi dalam memantau kegiatan parkir yang dilakukan oleh para juru parkir. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tindakan pungutan parkir oleh juru parkir bagi setiap pemilik kendaraan yang memiliki karcis parkir berlangganan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Struktur organisasi ini juga merupakan Birokrasi yang menyelenggarakan dan menangani pelaksanaan kegiatan pemerintah, dimana dalam hal ini Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan di Pemerintahan Kab. Lamongan. Dapat di digambarkan dibawah ini :



Gambar 10 Struktur Organisasi Dishub dalam Mengimplementasikan Kebijakan Parkir Berlangganan

Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Data Lapangan, 2017

Melalui struktur birokrasi dan alur komando yang jelas tentu dapat memperkecil timbulnya permasalahan yang muncul oleh karena pelaksanaan kerjasama antara instansi yang terkait. Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa masing-masing instansi memiliki tugas dan tanggung jawab dan itu semua dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan, Kantor Samsat serta Pihak Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Lamongan, dan masyarakat Lamongan sebagai pemanfaat parkir berlangganan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Beliau

“Tentu dalam menangani urusan parkir dan retribusi bukan hal yang mudah untuk diatur sendiri oleh dishub. Untuk itu perlu ada struktur dan alur yang jelas sehingga memudahkan dishub bersama dengan pihak samsat serta kepolisian untuk memonitoring pelaksanaan dari kebijakan parkir berlangganan”. (Hasil Wawancara dengan Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Pendapat Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terkait dengan adanya porsi dari masing-masing dinas dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan. Tetapi apa yang dirasakan masyarakat Lamongan sebagai pemanfaat parkir berlangganan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bapak Imron Malik sebagai masyarakat Lamongan yang memanfaatkan jasa parkir berlangganan mengungkapkan bahwa masyarakat menganggap kurangnya kontrol dan pengawasan dari Dinas Perhubungan serta pihak kepolisian mengakibatkan praktek pungutan yang dilakukan oleh para petugas juru parkir masih tetap saja berlangsung dimana adanya beberapa titik parkir berlangganan yang para petugas juru parkir masih

meminta uang retribusi parkir meskipun masyarakat telah menunjukkan karcis parkir berlangganan yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Lamongan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Kalau seperti ini ya berarti memang harus ada pengawasan yang rutin dari dishub sama polisi. Kan kita sudah bayar juga ke samsat waktu ngurus STN, kok malah sudah ada karcis masih ada saja jukir yang minta uang parkir”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Imron Malik sebagai masyarakat Lamongan, pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 12.20 WIB di Jalan Sunan Drajat, Kabupaten Lamongan)

Berikut ini peneliti juga menampilkan hasil dokumentasi dimana masih adanya praktek pungutan retribusi parkir terhadap para pengguna kendaraan meskipun para pengguna kendaraan telah memiliki kartu parkir berlangganan



Gambar 11 Pungutan Liar yang dilakukan oleh Juru Parkir

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

Menanggapi pendapat Bapak Imron Malik yang mengungkapkan bahwa kurang efektifnya struktur birokrasi yang dibentuk dimana masih minimnya kontrol yang dilakukan baik oleh Dishub Lamongan maupun dari pihak kepolisian, Bapak Sa'ad Daroni selaku tenaga kontrak yang bertugas sebagai petugas juru parkir mengungkapkan bahwa tidak semua pengguna kendaraan bermotor yang memiliki karcis atau kartu parkir berlangganan dikenai retribusi parkir olehnya. Beliau mengungkapkan bahwa praktek pungutan terhadap para

pemilik karcis dilakukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan untuk membeli kopi selama dirinya berjaga. Setelah memiliki uang dengan kisaran Rp.10.000/4 kendaraan roda dua, beliau pun tidak meminta biaya parkir kepada para pemegang karcis parkir berlangganan karena takut dilaporkan kepada pihak dinas perhubungan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Iya mas kalau dibilang setiap saat saya narik enggak juga karena ya paling saya cuman narik untuk sangu buat beli kopi. Kalau sudah dapat kisaran sepuluh ribu ya langsung saya berhenti minta uang parkir karena takut juga ya mas kalau sampai dilaporkan ke Dishub”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Sa’ad Daroni yang berprofesi sebagai petugas juru parkir, pada tanggal 24 agustus 2017 pukul 14.55 WIB di Toko Bintang Jaya Jln. KH. Hasyim Asyahi, Kabupaten Lamongan)

Selain alur/mekanisme dalam pengimplemntasian kebijakan parkir berlangganan yang ditetapkan melalui adanya Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010, peneliti juga melihat bagaimana koordinasi yang terjalin antara para implementor tersebut. Di Kabupaten Lamongan yang menjadi *leading sector* (pusat koordinasi) dari pelaksanaan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 adalah Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan seperti Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, Samsat Kabupaten Lamongan, Satlantas Polres Lamongan serta pihak-pihak lain yang tergabung dalam Gugus Tugas untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Toyibatul Af’al selaku Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bahwa struktur birokrasi dan SOP yang ada telah memungkinkan untuk menjlalkan kebijakan terkait parkir berlangganan di Kab. lamongan. Alur/ mekanisme dalam pengimplemntasian

kebijakan parkir berlangganan yang ditetapkan melalui adanya Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 harusnya dapat menjadi sebuah alat birokrasi yang dapat menjalankan kebijakan. Berikut wawancara dengan beliau

“Iya mas, Struktur birokrasi dan SOP yang ada dapat membantu kami dalam melakukan pekerjaan terkait dengan pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan ini. Tentu dalam menangani hal hal yang berkaitan dengan mekanisme birokrasi kami melakukan pengawasan secara berkala langsung ke lapangan untuk memonitor pekerjaan dari para petugas parkir.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Toyibatul Af'al selaku Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.44 WIB di ruang kerja Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan peneliti dilapangan terkait dengan struktur birokrasi yang dibentuk dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan masih belum berjalan dengan baik. kurang efektifnya komunikasi dari setiap pihak yang terlibat dalam pengimplementasian Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan hanya berkuat pada semakin meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mengedepankan kepatuhan serta tanggungjawab berdasarkan standar dalam tugas yang telah ditetapkan. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil demikian sebaliknya. Hubungan antara lembaga terkait baik eksternal maupun internal serta masyarakat yang tidak kalah

pentingnya menjadi penentu akan keberhasilan kebijakan retribusi parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan parkir berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tentu dihadapkan dengan adanya faktor penghambat. Berikut ini adalah Faktor penghambat yang muncul dalam proses pengimplementasian Kebijakan parkir berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan

a. Keterbatasan Jumlah SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Keterbatasan Sumberdaya Manusia atau para pegawai yang memiliki kualitas serta tingkat pendidikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengalami keterbatasan dimana jumlah pegawai dengan lulusan sekolah menengah atas (SMA) lebih banyak. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan SDM yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dikarenakan oleh jumlah pegawai dinas justru lebih banyak dari pegawai dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 26 orang pegawai, lulusan S1 sebanyak 15 orang pegawai, serta yang berlatar belakang pendidikan S2 berjumlah 9 orang dari jumlah keseluruhan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yakni sebanyak 50 orang pegawai.

Bapak Toyibatul Af'al selaku Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengakui bahwa salah hambatan dalam peningkatan

kinerja dari Dinas perhubungan kabupaten lamongan dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan adalah keterbatasan SDM dimana jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja dan banyaknya petugas juru parkir yang harus dikontrol. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Salah satu faktor penghambat yang memang perlu kita perbaiki yakni dalam hal peningkatan kualitas SDM maupun jumlah pegawai yang ada. sampai saat ini jumlah pegawai yang bertugas di Dishub cuman 50 orang dengan komposisi pegawai yang lulusan SMA paling banyak”. (Hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Toyibatul Af'al selaku Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.44 WIB di ruang kerja Kepala UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Tabel 6 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	9
2	S1	15
3	SMA	26
4	SD	-
TOTAL		50

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, 2017

Berdasarkan data pada tabel 9 terkait dengan Jumlah pegawai Dishub lamongan dilihat dari tingkat pendidikannya maka dapat dikatakan perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun dari latar belakang pendidikan pegawai dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan.

Selain itu Ibu Suryani Indarti, SE selaku Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan menambahkan bahwa keterbatasan dari

jumlah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu faktor penentu didalam proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang mana jumlah pegawai dari lulusan SMA masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai Dishub dengan lulusan S1 maupun S2. Keterbatasan pada jumlah aparatur Dishub Lamongan membuat kontrol akan keberlangsungan kebijakan parkir berlangganan tidak dapat dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun kualitas dari aparatur Dishub Lamongan masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Sebagai dinas yang ditunjuk sebagai penanggungjawab, kita selalu berusaha semaksimal mungkin walaupun jumlah pegawai maupun tingkat pendidikan masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada, itu sebabnya kita libatkan para petugas parkir yang merupakan tenaga kontrak atas hasil kerjasama bersama pihak swasta, kita sebagai dinas hanya sebatas memonitoring sejauh mana pelaksanaan dari kegiatan retribusi berlangganan dilapangan” (Hasil Wawancara dengan Ibu Suryani Indarti, SE selaku Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09.15 WIB di ruang kerja Kasubag Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

UPT Manajemen dan Rekayasa Lalulintas (Menrek) pada Dinas Perhubungan dalam proses pengimplementasian kebijakan retribusi berlangganan merupakan salah satu sarana organisasi pendukung untuk membantu pelaksanaan peningkatan potensi PAD yang dikepalai oleh Bapak Tony Ariantoro, SAP.MM. Bapak Tony Ariantoro, SAP.MM menuturkan bahwa didalam menutupi kekurangan dari SDM dari aparatur Dishub agar mampu memonitoring pelaksanaan dari kebijakan parkir berlangganan, Dishub Lamongan dalam setiap tahun anggaran selalu mengadakan pelatihan maupun peningkatan kapasitas bagi

setiap pegawainya baik ditingkat atas maupun hingga tingkat terendah yang tidak hanya dilakukan di daerah lamongan saja melainkan melaui kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan yang ada luar daerah Lamongan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas dari sumberdaya aparatur yang ada sekaligus sebagai bahan perbaikan dari kegiatan yang telah dijalankan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Harus kita akui bahwa hingga sejauh ini sumberdaya yang terlibat dalam memonitoring pelaksanaan perda masih sangat kurang memadai dari segia kapasitas maupun kualitas. Sebagai langkah perbaikan, kita selalu adakan pelatihan baik yang dilakukan didalam maupun ke luar daerah. ini tentu dapat dijadikan sebagai ajang perbaikan dan peningkatan kemampuan dari setiap aparatur khususnya yang bertugas di UPT Menrek Dishub Lamongan” (Hasil Wawancara dengan Bapak Tony Ariantoro, SAP. MM selaku Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas Dinas Perhunganan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09.15 WIB di ruang kerja Kasi Manajemen Rekayasa dan Laulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam menggerakan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang fungsinya adalah menggerakan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Adanya hambatan terkait dengan jumlah maupun kemampuan aparatur pada dinas perhubungan kabupaten lamongan tentu akan berpengaruh terhadap proses pengimplementasian Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang ingin dicapai didalam proses pengimplementasian dari kebijakan parkir berlangganan yakni meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) disetiap tahunnya dari sektor pajak yakni retribusi parkir

kendaraan dapat tercapai secara efektif dan maksimal. tujuan kebijakan parkir berlangganan Kabupaten Lamongan dapat dilihat jelas bahwa tujuan utamanya adalah peningkatan pemasukan daerah dari upaya pengoptimalan penggalian sumber pemasukan yang besar dalam pengelolaan yang baik yaitu dengan cara menjalankan kebijakan parkir berlangganan karena dengan menjalankan kebijakan parkir berlangganan setiap wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya tiap tahunnya sudah juga termasuk membayar parkir berlangganan. Dengan sistem itulah pendapatan dari sektor retribusi parkir tidak terjadi kebocoran.

b. Kurangnya Kontrol dari Dinas Perhubungan terhadap para Petugas Juru Parkir

Proses pengawasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir merupakan hal yang paling penting sekali dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga mampu mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini pada akhirnya akan bermanfaat dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan. Petugas juru parkir yang merupakan mata rantai komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dinilai oleh beberapa masyarakat lamongan seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Imron Malik sebagai masyarakat Lamongan yang memanfaatkan jasa parkir berlangganan bahwa kurangnya kontrol dan pengawasan dari Dinas Perhubungan serta pihak kepolisian mengakibatkan praktek pungutan yang dilakukan oleh para petugas juru parkir masih tetap saja berlangsung dimana adanya beberapa titik parkir berlangganan yang para petugas juru parkir masih meminta uang retribusi parkir

meskipun masyarakat telah menunjukan karcis parkir berlangganan yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Lamongan. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Kalau seperti ini ya berarti memang harus ada pengawasan yang rutin dari dishub sama polisi. kan kita sudah bayar juga ke samsat waktu mengurus STN, kok malah sudah ada karcis masih ada saja jukir yang minta uang parkir”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Imron Malik sebagai masyarakat Lamongan, pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 12.20 WIB di Jalan Sunan Drajat, Kabupaten Lamongan)

Terkait dengan masih lemahnya kontrol dan pengawasan atas praktek pungutan liar diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tentang tentang Parkir berlangganan, Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengakui bahwa hingga saat ini beliau telah mendapatkan laporan dan keluhan terkait dengan masih adanya beberapa petugas parkir yang melakukan pungutan parkir diluar dari ketentuan. Beliau menambahkan bahwa pihaknya hingga sejauh ini telah melaksanakan tugas secara maksimal namun keterbatasan jumlah pegawai pada dinas perhubungan yang bertugas untuk mengawasi para petugas juru parkir masih belum sebanding dengan jumlah petugas juru parkir yang ada. belum lagi jam kerja para pegawai dinas perhubungan yang tidak sama dengan jam kerja para petugas parkir yang mulai menjalankan kegiatan pengaturan parkir sejak pagi hari yakni pukul 07.00 hingga pukul 21.00 malam. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Kita hingga saat ini sudah bekerja dan berusaha dengan maksimal walaupun memang keluhan seperti tidak sepenuhnya langsung dapat terselesaikan karena harus saya akui bahwa jumlah pegawai pengawas parkir sngat minim dibandingkan dengan jumlah titik parkir dan petugas juru parkir yang ada di Kabupaten Lamongan apalagi jam kerja mereka

berbeda” (Hasil Wawancara dengan Bapak A.Farikh, SH.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 08.15 WIB di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan)

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan dilapangan terkait dengan kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan pengaturan parkir serta adanya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para petugas juru parkir terhadap para pengguna kendaraan bermotor yang memiliki karcis parkir berlangganan menunjukan bahwa Dinas Perhubungan serta *stakeholders* lain yang terlibat didalam implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tentang tentang Parkir berlangganan hanya sebatas agar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan disetiap tahunnya tanpa memperhatikan dan memperbaiki sistem pengawasan serta kontrol terhadap para petugas pelaksana yang ada di tingkat bawah. Jika kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus, hal seperti ini tentu akan mengakibatkan kebocoran anggaran pendapatan dari sektor retribusi parkir kendaraan serta akan berdampak pada perlambatan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir yakni parkir berlangganan.

C. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan adalah salah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan menurut Wahab (2001:24), merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan dan upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Implementasi kebijakan parkir berlangganan tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mensejahterakan masyarakatnya dimana menurut Thomas Dye (1992) dalam Sahya (2014:35), Pemerintah mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Tak terkecuali penyediaan lahan parkir yang memadai. Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai, serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi pelayanan jasa parkir di Kabupaten Lamongan yang dirasa masih kurang optimal baik pelayanan, fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal.

Kebijakan parkir berlangganan merupakan satu upaya dari pemerintah

daerah Kabupaten Lamongan untuk melakukan penertiban parkir liar dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini ternyata cukup efektif dalam menunjang pendapatan asli daerah. Pelaksanaan retribusi parkir berlangganan ini tentunya juga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan. Peraturan Daerah ini disusun guna menyesuaikan pengaturan Retribusi Parkir Berlangganan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan untuk penyediaan pelayanan, pengaturan, serta pemanfaatan tempat khusus parkir guna memperlancar lalu-lintas jalan. Peraturan Daerah ini untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan di tempat parkir. Disusun dalam rangka penyederhanaan cara pembayaran retribusi dan penertiban juru parkir sehingga memberikan kemudahan bagi Wajib Retribusi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Berlangganan.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan merupakan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Perda Kab. Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan sebagai prosedur operasional perpajakan yang dimana jasa parkir memiliki tugas dan tujuan untuk mengatur lalu lintas di dalam jasa perpajakan dan telah memiliki prosedur serta tahapan di dalam pelaksanaannya seperti membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan (satu tahun) untuk lokasi parkir yang berlaku.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan merupakan sebuah kebijakan yang dimana mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan masyarakat yang intinya ada hubungan sebab akibat di dalam pelaksanaannya. Meter dan Hornn dalam Wahab (2012:135) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dimana melalui kebijakan parkir berlangganan, maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya parkir yang jauh lebih murah dan hemat. Kebijakan parkir berlangganan merupakan bentuk kebijakan Pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lali lintas jalan raya dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan parkir berlangganan tidak lepas dari kewenangan Daerah didalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mensejahterahkan warganya.

Dalam kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan, Pemerintah Kabupaten Lamongan membagi sistem parkir menjadi beberapa sistem yaitu dengan sistem harian dan sistem parkir berlangganan. Kedua sistem itu dilakukan di tempat parkir umum yang dalam hal ini sistem parkirnya dikelola oleh pemerintah. Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa untuk tempat parkir khusus dapat dikelola oleh pemerintah, perorangan atau badan hukum sedangkan tempat parkir insidental bisa

dilaksanakan atas ijin Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum. Parkir berlangganan merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adapun tujuannya untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih inovatif dan juga peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir berlangganan. Adapun dasar hukum dari kebijakan parkir berlangganan adalah sebagai berikut:

1. Perda Kab. Lamongan Nomor: 6 Tahun 2004 Tanggal : 2 Desember 2004
Tentang : Pengelolaan Retribusi Parkir
2. Perda Kab. Lamongan Nomor: 15 Tahun 2010 Tanggal : 11 November 2010
Tentang : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
3. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 22 Tahun 2004 Tanggal : 31 Desember 2004
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab.Lamongan No. 6 Tahun 2004
4. SK. Gub. Prop. Jatim No. 47 Tahun 2011 Tentang : Persetujuan Pelaksanaan Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dengan Pemerintah kabupaten / Kota di Jawa Timur.
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab. Lamongan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan POLRES Lamongan Nomor: 181.1/1/413.013/2012 970/57/120.22/ 2012 B/1986/16/2012
Tentang : Pelaksanaan Pemungutan retribusi parkir berlangganan kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan

Proses pembayaran parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan cukup mudah dan cepat prosesnya masuk ke kas daerah. menurut hasil wawancara

peneliti ditemukan bahwa pembayaran parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan menggunakan sistem “*notice*” langsung pada STNK pemberian stiker atau kartu parkir berlangganan ketika pengurusan pajak tahunan kendaraan bermotor oleh setiap wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Lamongan dan kemudian SAMSAT Lamongan langsung menyetorkan ke kas daerah melalui Bank Jatim. Sedangkan parkir harian dimana pengguna jasa parkirnya adalah kendaraan bermotor dengan plat nomor di luar daerah lamongan langsung membayar ke petugas parkir. petugas parkir yang menerima bayaran dari pengguna jasa parkir harian dalam hari itu langsung menstorkan kepada petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Uang parkir yang terkumpul di Dinas Perhubungan Kabupaten lamongan akan disetorkan langsung ke rekening PEMDA Lamongan.

Kebijakan parkir berlangganan Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu membangun Kabupaten Lamongan melalui peningkatan pendapatan dari sektor retribusi parkir. tujuan itu merupakan kesimpulan dari beberapa tujuan lain yang lebih spesifik yaitu pengoptimalan pemasukan dikarenakan Kabupaten Lamongan juga mengalami kebocoran pemasukan dari retribusi parkir dimana menurut Prakosa (2003:88), timbulnya kebocoran pemasukan yang bersumber dari retribusi parkir disebabkan oleh adanya sistem yang membuat pemasukannya tidak optimal serta rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi ijin. Salah satu tujuan lainnya dari kebijakan parkir berlangganan adalah memperbaiki sistem perparkiran di Kabupaten Lamongan dengan dan juga diharapkan bisa lebih tertib dalam area parkir dan juga menjaga ketertiban

lalulintas. Tujuan lainnya adalah pelayanan kepada pengguna jasa parkir berlangganan karena pengguna jasa parkir berlangganan berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas di lapangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan selaku organisasi pelaksana melakukan beberapa strategi yang berhubungan dengan sistem pengelolaan perparkiran yang ada, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Menurut Brata dan Trihartanto (2004:52), hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya parkir yang jauh lebih murah dan hemat. mulai dari persiapan sumber daya manusia dengan memberi pembekalan juru parkir. mempersiapkan sistem di dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, mempersiapkan sistem juga yang tiap tahunnya mengalami penyempurnaan. Berinovasi dengan membuat sistem online dalam pembayaran retribusi parkir berlangganan dimana *notice* pembayarannya langsung melekat pada *notice* pajak kendaraan yang harus dibayarkan tiap tahunnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan juga melakukan strategi pendekatan kepada masyarakat dengan bersosialisasi ke desa-desa dan juga melakukan SAMSAT keliling yang bekerjasama dengan instansi lain dalam langkah jemput bola dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Di luar itu Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan juga memberikan *reward* kepada pengguna jasa parkir berlangganan dengan mengadakan undian dari kupon parkir berlangganan untuk menarik animo masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, Sebelum kebijakan retribusi parkir berlangganan diberlakukan, pendapatan dari sektor retribusi parkir hanya mencapai Rp 300.000.000,- per tahunnya, sedangkan dengan diberlakukan kebijakan parkir berlangganan yang dilaksanakan secara efektif oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksananya menghasilkan pendapatan asli daerah di sektor retribusi parkir pada tahun berikutnya sebesar Rp 6.135.960.000. adanya peningkatan pendapatan dari sektor retribusi parkir berlangganan menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan parkir berlangganan ini secara efektif maka akan terjadi peningkatan pendapatan. Karena semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan maka semakin meningkat pula pendapatan dari sektor parkir sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan. Bisa dikatakan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan, peningkatan pendapatan asli daerah di sektor retribusi parkir mengalami peningkatan tiap tahunnya karena peningkatannya juga seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abidin, (2002:14) bahwa untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut ,tujuan, tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program

Implementasi kebijakan parkir berlangganan merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan melalui Peraturan Daerah Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Parkir berlangganan yang diambil dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai prosedur operasional perpajakan yang dimana jasa parkir memiliki tugas dan tujuan untuk mengatur lalu lintas di dalam jasa perpajakan dan telah memiliki prosedur serta tahapan di dalam pelaksanaannya seperti membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan (satu tahun) untuk lokasi parkir yang berlaku. implementasi parkir berlangganan ini merupakan sebuah kebijakan yang dimana mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan masyarakat yang intinya ada hubungan sebab akibat di dalam pelaksanaannya. Kebijakan parkir berlangganan adalah salah satu program pemerintah, sebagai salah satu solusi jitu sistem pengelolaan perpajakan yang ada, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa parkir (masyarakat) dan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan mekanisme pembayaran tarif parkir dan biaya parkir yang jauh lebih murah dan hemat. Kebijakan parkir berlangganan merupakan bentuk kebijakan Pemerintah daerah dalam upaya untuk mencapai beberapa tujuan terkait dengan kelancaran lalu lintas jalan raya dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan parkir berlangganan tidak lepas dari kewenangan Daerah didalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, tata ruang kota dan secara umum merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mensejahterahkan warganya.

Terkait dengan proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Widodo (2007:28) menjelaskan bahwa suatu kebijakan publik tentu harus diimplementasikan agar dampak atau tujuan adanya kebijakan dapat tercapai dimana kebijakan hanya akan menjadi sebuah catatan diatas kertas apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam proses pengimplementasian kebijakan publik terdapat beberapa model yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implemtasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Abidin (2002:131), dimana Model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III menyatakan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat (4) variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini dapat dijelaskan masing-masing variabel yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan

a. Komunikasi

Komunikasi dalam proses implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusioanal yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah. Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam menjalankan sebuah kebijakan. Dalam komunikasilah pesan-pesan disampaikan dan juga berbagai informasi terkait pelaksanaan dari suatu kebijakan. Komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan

kesalahpahaman yang menimbulkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan baik. Komunikasi dilakukan antar sesama implementor atau badan pelaksana kebijakan dan juga komunikasi kepada kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses implementasi, semua pelaksana sudah seharusnya memahami dan mendukung apa yang menjadi tujuan kebijakan (Nugroho, 2009:17).

Selain komunikasi yang dilakukan dengan sesama implementor atau badan pelaksana di Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan juga melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat luas. Komunikasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan diberlakukannya kebijakan parkir berbayar serta besaran yang harus dibayarkan oleh masyarakat dalam memanfaatkan jasa parkir berlangganan yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan terkait dengan penyelenggaraan retribusi parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan. Komunikasi yang terjalin selama ini antara Dinas Perhubungan, pihak swasta sebagai pihak ketiga, maupun dengan pihak kepolisian yakni satuan Lalulintas Polres Lamongan telah berjalan dengan sangat bagus dimana sebagai SKPD yang bertanggung jawab didalam memonitoring berjalannya kebijakan retribusi berlangganan, Dinas Perhubungan juga berkomunikasi dengan pihak swasta yang berperan sebagai penyedia petugas parkir maupun pihak satuan lalu lintas polres Lamongan dalam menggelar operasi penertiban terhadap kegiatan/petugas parkir liar yang tidak terdaftar di dinas perhubungan Kab. Lamongan.

Kejelasan isi pesan yang disampaikan menurut Agustino (2006:150) akan sangat mempengaruhi penerima pesan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari program. Karena pesan yang jelas atau tidak samar-samar akan menghindari penafsiran menyimpang dari yang dimaksudkan. Selain itu juga harus memperhatikan aspek konsistensi. Suatu pesan yang disampaikan haruslah konsisten, karena jika pesan yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima pesan. Dimana pesan tersebut haruslah mempunyai kesesuaian antara apa yang diberikan oleh pengirim pesan dengan petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan dan dengan yang disampaikan oleh media lain (media cetak dan elektronik).

Dalam penyelenggaraan parkir berlangganan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan, komunikasi program ini menggunakan berbagai media cetak dan elektronik. Pada penelitian ditemukan bahwa penyampaian informasi serta pesan kepada masyarakat, setiap dinas yang ada di Kabupaten Lamongan, saling bahu membahu melengkapi informasi melalui media cetak seperti Koran (Jawa Pos, Kompas, dan sebagainya), Spanduk atau banner yang dipasang di depan Rumah Sakit, di jalan-jalan strategis maupun tempat-tempat umum seperti halnya kegiatan pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bersama dengan pihak satuan lalulintas kabupaten Lamongan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan parkir berlangganan disekitaran tempat

perbelanjaan yang ada di Jalan Basuki Rahmat maupun disekitaran area parkir yang ada di RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan.

Disamping itu komunikasi juga disampaikan melalui sosialisasi, rapat dengar pendapat antar institusi penyelenggara Parkir Berlangganan maupun dengan setiap SKPD yang ada di Kabupaten Lamongan untuk ikut ambil bagian didalam menjalankan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Parkir Berlangganan. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagai Dinas pelaksana kebijakan parkir berlangganan saat ini berupaya untuk memberikan penyuluhan bagaimana seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), masyarakat umum maupun para petugas parkir mampu menerapkan pelayanan parkir berlangganan sebagai upaya peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kendaraan yang ada di Kabupaten Lamongan secara efektif dan maksimal. Hal tersebut bisa terlaksana apabila masyarakat terdaftar sebagai pengguna parkir berlangganan yang menggunakan nomor kendaraan plat S (Lamongan).

Penyelenggaraan Kegiatan parkir berlangganan dan penerimaan pajak yang bersumber dari kegiatan parkir berlangganan secara keseluruhan menurut Brata dan Trihartanto (2004:52) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan representatif sebagai salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga. pertanggung jawaban petugas parkir berlangganan akan sistem keamanan dan pengelolaan retribusi parkir yang menerapkan asas Akuntabilitas dan Transparansi telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengingat pelayanan, kenyamanan

,penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir berlangganan serta kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Lamongan dalam hal mengelola pendapatan retribusi Parkir berlangganan. Adapun alur-alur yang harus dipenuhi oleh masyarakat kabupaten lamongan didalam mengurus kartu parkir berlangganan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat bisa datang secara langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dengan membawa STNK kendaraan ataupun dapat mengurusnya ketika pembayaran pajak kendaraan di kantor SAMSAT atau SAMSAT keliling.
2. Ketika telah menunjukan STNK, petugas SAMSAT ataupun petugas Dishub langsung mencatatkan kode kendaraan yang nantinya akan dicantumkan pada karcis ataupun pada kartu parkir berlangganan selama 1 tahun dengan besaran biaya yang telah disesuaikan dengan jenis kendaraan yang dimiliki.
3. Pada saat itu juga masyarakat dapat memperoleh karcis atau kartu parkir berlangganan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan ataupun melalui kantor SAMSAT Kabupaten Lamongan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan ditetapkan bahwa besaran harga yang harus di bayar oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk parkir berlangganan dan parkir harian adalah sebagai berikut:

1. Parkir harian
 - a. Untuk kendaraan bermotor JBB > 3.500 Kg (bus, truk, mobil barang, atau kendraan sejenisnya) sebesar Rp 2.500,- per satu kali parkir.

- b. Untuk kendaraan bermotor JBB < 3.500 Kg (mini bus, mini truk, pick up, pick up box, MPU, atau kendaraan sejenisnya) sebesar Rp 1.500,- per satu kali parkir.
 - c. Untuk kendaraan / mobil pribadi (colt station wagon, station wagon, jeep dan kendaraan sejenisnya) sebesar Rp 2000,- per sekali parkir.
 - d. Sepedah motor sebesar Rp 500,- per satu kali parkir. E. Sepedah atau kendaraan tidak bermotor Rp 200,- per satu kali parkir.
2. Parkir Berlangganan
- a. Mobil Penumpang Umum, bus, truk, pick up, pick up box, angkutan khusus sebesar Rp 40.000,- Per tahun
 - b. Sepeda motor sebesar Rp 20.000,- per tahun.

Komunikasi yang dibangun dalam memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik ditingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dengan melibatkan masyarakat, para petugas parkir, pihak sataun lalulintas maupun para pemangku di masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Lamongan masyarakat pengguna jasa parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan mengungkapkan bahwa pada awal penerapan parkir berlangganan beliau tidak mengalami kebingungan lagi sebab sebelum parkir berlangganan diberlakukan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Lamongan, masayarakat telah mendapatkan informasi implementasi dari kebijakan parkir berlangganan melalui radio udara maupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan di kantor Kecamatan Sukodadi yang digelar oleh Dinas perhubungan dan pihak satuan lalulintas Polres Lamongan.

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, implementasi kegiatan parkir berlangganan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Lamongan mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dimana dalam setiap tahunnya sejak diimplementasikan kebijakan retribusi parkir berbayar, peningkatan PAD mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan sebelum Kebijakan Parkir berlangganan diimplementasikan. Keberhasilan dalam proses pengimplementasian dari kebijakan parkir berlangganan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan tidak lepas juga dari adanya komunikasi yang baik dari setiap pemangku kebijakan didalamnya yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Pihak Satuan Lalulintas Polres Lamongan, Samsat Lamongan, masing-masing SKPD di Kabupaten Lamongan, para petugas jukir yang ditugaskan serta masyarakat Lamongan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya Menurut Abidin (2002:131-132) merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia, dana (anggaran) diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran maupun peralatan yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas dimana kondisi ini dapat menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Dalam menunjang kegiatan pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

tidak hanya ditunjang oleh sumberdaya manusia tetapi juga ditunjang oleh sumberdaya anggaran. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan dapat dideskripsikan sebagai berikut

a. Sumberdaya Manusia

Berbicara tentang organisasi menurut Abidin (2002:131-132) sama halnya berbicaranya tentang aspek kelembagaan yang didalamnya termasuk kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kondisi sumberdaya manusia atau aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan Jenis pendidikan serta jumlah pegawai maupun para petugas parkir sebagai tenaga kontrak yang terlibat dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan

Jumlah pegawai Dishub dan petugas parkir lamongan dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan dapat dikatakan bahwa jumlah dari pegawai dinas perhubungan yang ada saat ini justru tidak sebanding dengan jumlah petugas parkir yang bertindak sebagai tenaga kontrak didalam mengawasi kegiatan parkir di lapangan. Belum lagi jumlah pegawai pada dinas perhubungan justru lebih banyak dari dari petugas yang hanya berlatar belakang pendidikan di tingkat SMA yakni 26 orang dibandingkan dengan para petugas Dishub yang merupakan lulusan S1 yang hanya berjumlah 15 orang maupun S2 yang hanya berjumlah 9 orang. Pada penelitian ditemukan bahwa keterbatasan dari jumlah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu faktor penentu didalam

proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang mana jumlah pegawai dari lulusan SMA masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai Dishub dengan lulusan S1 maupun S2. Keterbatasan pada jumlah aparatur Dishub Lamongan membuat kontrol akan keberlangsungan kebijakan parkir berlangganan tidak dapat dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun kualitas dari aparatur Dishub Lamongan masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan.

UPT Manajemen dan Rekayasa Lalulintas (Menrek) pada Dinas Perhubungan dalam proses pengimplementasian kebijakan retribusi berlangganan merupakan salah satu sarana organisasi pendukung untuk membantu pelaksanaan penggalan potensi didalam menutupi kekurangan dari SDM dari aparatur Dishub agar mampu memonitoring pelaksanaan dari kebijakan parkir berlangganan, Dishub Lamongan dalam setiap tahun anggaran selalu mengadakan pelatihan maupun peningkatan kapasitas bagi setiap pegawainya baik ditingkat atas maupun hingga tingkat terendah yang tidak hanya dilakukan di daerah lamongan saja melainkan melaui kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan yang ada luar daerah Lamongan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas dari sumberdaya aparatur yang ada sekaligus sebagai bahan perbaikan dari kegiatan yang telah dijalankan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumberdaya manusia merupakan

modal penting dalam menggerakkan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang fungsinya adalah menggerakkan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Sumberdaya yang terlibat baik dalam merencanakan maupun mengimplemetasikan Perda Kab. Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan tidak hanya melibatkan petugas dinas perhubungan ataupun petugas UPT (Manajemen Rekayasa Lalulintas (Menrek) Dishub saja melainkan juga melibatkan peran dan fungsi dari para tenaga kontrak yang bertugas di 89 titik parkir berlangganan yang telah ditetapkan oleh dinas perhubungan. Sebagai upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta kuantitas dari setiap SDM yang ikut ambil bagian didalam proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan, Dishub Kab. Lamongan juga selalu menganggarkan kegiatan pelatihan maupun peningkatan kapasitas. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang ingin dicapai didalam proses pengimplementasian dari kebijakan parkir berlangganan yakni meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) disetiap tahunnya dari sektor pajak yakni retribusi parkir kendaraan dapat tercapai secara efektif dan maksimal. tujuan kebijakan parkir berlangganan Kab. Lamongan dapat dilihat jelas bahwa tujuan utamanya adalah peningkatan pemasukan daerah dari upaya pengoptimalan penggalan sumber pemasukan yang besar dalam pengelolaan yang baik yaitu dengan cara menjalankan kebijakan parkir berlangganan. Karena dengan menjalankan kebijakan parkir berlangganan setiap wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya tiap tahunnya sudah juga termasuk membayar parkir berlangganan. Dengan sistem ini pendapatan dari sektor retribusi parkir tidak terjadi kebocoran.

b. Sumberdaya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, yang tersedia maka proses implementasi dilapangan akan lebih mudah dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia lebih sedikit maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Islamy (2009:57) menambahkan bahwa ketersediaan dana dalam mendukung keberlangsungan dari setiap kegiatan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana Dana sangat berpengaruh terhadap penggunaan strategi dan cara-cara dalam implementasi kebijakan sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka cara-cara dan strategi implementasi akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang tersedia kurang, cara-cara atau strategi implementasi kebijakan akan menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia dengan kata lain implementasi menyesuaikan jumlah dana yang tersedia.

Menurut hasil wawancara peneliti ketersediaan dana sudah tidak menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan sebab setiap kegiatan yang dijalankan mendapatkan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ketersedian sumber daya finansial atau sarana prasarana yang mencukupi akan mendukung suatu keberhasilan kebijakan dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan dapat diandalkan akan sangat menentukan keberhasilan program.

Sumberdaya anggaran ikut menjadi penentu dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Ketersediaan dana dalam mendukung keberlangsungan dari setiap kegiatan merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, semakin banyak dana Dana sangat berpengaruh terhadap penggunaan strategi dan cara dalam implementasi kebijakan sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka cara-cara dan strategi implementasi akan dapat sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, akan tetapi jika dana yang tersedia kurang, strategi implementasi kebijakan akan menyesuaikan besarnya jumlah dana yang tersedia atau implementasi menyesuaikan jumlah dana yang tersedia.

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, sumber dana yang digunakan bersumber dari APBD Lamongan dimana hal ini memang telah diatur didalam Perda Kab. Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Parkir berlangganan. dalam proses pengimplementasian kebijakan terkait dengan kegiatan parkir berlangganan, sumber dana dari kegiatan secara keseluruhan berasal dari APBD Kab. Lamongan. Pemerintah daerah melalui dinas perhubungan Kab. Lamongan hingga sejauh ini belum menemukan hambatan yang berarti terkait dengan anggaran sebab berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua narasumber diatas mengungkapkan bahwa proses penyusunan kegiatan yang ada dalam kegiatan pengimplementasian kebijakan retribusi berbayar disusun berdasarkan jumlah anggaran yang ada. hal ini memungkinkan setiap kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran dapat dilaksanakan secara penuh tanpa dihadapkan dengan persoalan akan terbatasnya anggaran.

c. Disposisi

Pelaksanaan sebuah kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila pelaksana atau implementor dari kebijakan itu sendiri memiliki komitmen dan konsisten terhadap aturan main yang berlaku. Edwards III dalam Abidin (2002:131-133) mengungkapkan bahwa fokus utama dari studi implementasi adalah persoalan tentang bagaimana organisasi berperilaku, atau bagaimana orang berperilaku dalam mencapai tujuan organisasi. kecenderungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkah laku dari pelaksana program yaitu petugas lapangan apakah mendukung atau bertentangan dengan program yang mereka sampaikan.

Terkait dengan implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksana kebijakan yang dalam hal ini lebih menitik beratkan pada aparaturnya dinas perhubungan maupun para tenaga kontrak yang bertindak sebagai juru parkir dinilai oleh sebagian masyarakat Lamongan masih belum mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya khususnya para petugas parkir. Meskipun kebijakan retribusi parkir telah ditetapkan dengan dasar hukum yang jelas yakni melalui Perda Nomor 15 tahun 2010, namun hingga kini masih saja ada juru parkir yang melakukan meminta uang parkir walaupun masyarakat telah menunjukan karcis parkir berlangganan kepada juru parkir.

Masyarakat Kabupaten Lamongan yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa para juru parkir tidak akan meminta uang parkir ketika petugas dinas perhubungan yang ikut mengawasi. Tetapi jika petugas dinas

perhubungan telah selesai jam kerjanya, para petugas parkir akan mulai meminta uang parkir meskipun para pemilik kendaraan telah menunjukkan karcis parkir secara gratis. Beliau menambahkan juga bahwa pihak dinas perhubungan harus secara rutin melakukan pengawasan kepada setiap petugas parkir yang melakukan pungutan dan tegas untuk memberikan sanksi apabila ada petugas parkir yang tetap meminta uang parkir meskipun pemilik kendaraan telah menunjukkan karcis parkir berlangganan. Adanya kegiatan pungutan parkir diluar dari ketentuan dalam proses pemungutan retribusi parkir Menurut Brata (2003:26) merupakan sebuah ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan dengan benar sehingga dapat menyebabkan hasil yang kurang maksimal terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berimbas pada terjadinya kebocoran sumber anggaran

Merespon terkait dengan masih adanya petugas juru parkir yang melakukan pungutan terhadap masyarakat pemilik karcis parkir kendaraan berlangganan, Kasi audit dan inspeksi jalan menjelaskan bahwa hingga sejauh ini beliau telah mendapatkan beberapa keluhan terkait dengan adanya pungutan dari petugas juru parkir yang masih melakukan pungutan terhadap pemilik kendaraan meskipun para pemilik kendaraan tersebut telah menunjukkan karcis parkir berlangganan. Untuk itu pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi kekurangan melalui kegiatan evaluasi berdasarkan keluhan dari masyarakat terkait dengan sikap petugas parkir yang belum mampu menjalankan tugasnya di lapangan. Beliau menghimbau agar apabila ada masyarakat lamongan yang merasa telah memiliki karcis parkir berlangganan namun tetap dimintai uang

parkir oleh petugas parkir maka beliau menghimbau untuk segera melapor ke kantor dinas dengan menunjukkan besaran tagihan parkir maka dinas perhubungan kabupaten lamongan akan memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000) ataupun masyarakat dapat langsung segera melapor ke kantor polisi sebab tindakan semacam ini merupakan tindakan melanggar hukum yaitu dengan melakukan pungutan liar. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa hingga sejauh ini telah banyak petugas parkir yang kontraknya diputus oleh dinas perhubungan sebab didalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dilapangan, para petugas parkir masih tetap melakukan pungutan walaupun sebelumnya telah diberikan teguran dan pembinaan oleh petugas dinas perhubungan kabupaten lamongan. dinas perhubungan kabupaten lamongan tidak akan segan-segan melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak apabila ada petugas parkir yang tertangkap melakukan pungutan terhadap pengguna kendaraan bermotor walaupun para penngendara kendaraan telah menunjukan karcis parkir berlangganan.

Proses pengawasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir menurut Brata (2003:26) merupakan hal yang paling penting sekali dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga mampu mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh para pegawai dinas perhubungan membuat para petugas juru parkir lainnya memanfaatkan keadaan seperti ini untuk melakukan pungutan meskipun para pengendara telah menunjukan karcis parkir berlangganan. Adapun petugas parkir hanya akan

meminta uang parkir apabila pengendara tidak menunjukkan karcis parkir berlangganan mengingat sanksi apabila ada masyarakat yang melaporkan tindakan pungutan diluar dari prosedur yang ada makanya dirinya bisa terancam diberhentikan oleh dinas perhubungan.

Setelah memahami dari apa yang responden jelaskan serta melakukan observasi dan pengamatan terkait dengan kecenderungan atau sikap dari pelaksana kebijakan didalam mendukung kebijakan Retribusi Parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan, saat ini masih masih belum berjalan secara baik dimana masih terlihat adanya kegiatan pungutan uang parkir yang dilakukan oleh petugas juru parkir kepada setiap pengendara kendaraan meskipun para pemilik kendaraan telah menunjukkan karcis parkir berlangganan. Selain itu, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh para petugas dinas perhubungan perlu ditingkatkan lagi dalam memantau kegiatan parkir yang dilakukan oleh para juru parkir. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tindakan pungutan parkir oleh juru parkir bagi setiap pemilik kendaraan yang memiliki karcis parkir berlangganan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Edwards III dalam Abidin (2002:131-133) mengungkapkan bahwa aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri dimana aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operational procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan

dan sasaran kebijakan. aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. struktur organisasi ini juga merupakan Birokrasi yang menyelenggarakan dan menangani pelaksanaan kegiatan pemerintah, dimana dalam hal ini Implementasi Kebijakan Parkir berlangganan di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Melalui struktur birokrasi dan alur komando yang jelas tentu dapat memperkecil timbulnya permasalahan yang muncul oleh karena pelaksanaan kerjasama antara instansi yang terkait. Pada penelitian ditemukan bahwa bahwa masing-masing instansi memiliki tugas dan tanggung jawab dan itu semua dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan, Kantor Samsat serta Pihak Satuan Lalulintas Kepolisian Resort Lamongan, dan masyarakat Lamongan sebagai pemanfaat parkir berlangganan. Tetapi apa yang dirasakan masyarakat Lamongan sebagai pemanfaat parkir berlangganan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Mukhlis dan Simanjuntak (2011:42) mengungkapkan bahwa didalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir, pengawasan dan pengendalian adalah sebagai proses penentuan, apa yang dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini justru menunjukan adanya ketimpangan dimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Lamongan yang

memanfaatkan jasa parkir berlangganan mengungkapkan bahwa masyarakat menganggap kurangnya kontrol dan pengawasan dari Dinas Perhubungan serta pihak kepolisian mengakibatkan praktek pungutan yang dilakukan oleh para petugas juru parkir masih tetap saja berlangsung dimana adanya beberapa titik parkir berlangganan yang para petugas juru parkir masih meminta uang retribusi parkir meskipun masyarakat telah menunjukkan karcis parkir berlangganan yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Lamongan.

Selain alur/mekanisme dalam pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang ditetapkan melalui adanya Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010, peneliti juga melihat bagaimana koordinasi yang terjalin antara para implementor tersebut. Di Kabupaten Lamongan yang menjadi *leading sector* (pusat koordinasi) dari pelaksanaan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 adalah Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan seperti Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, Samsat Kabupaten Lamongan, Satlantas Polres Lamongan serta pihak-pihak lain yang tergabung dalam Gugus Tugas untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara serta temuan peneliti dilapangan terkait dengan struktur birokrasi yang dibentuk dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan masih belum berjalan dengan baik. kurang efektifnya komunikasi dari setiap pihak yang terlibat dalam pengimplementasian Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir berlangganan hanya berkuat pada semakin meningkatnya

pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mengedepankan kepatuhan serta tanggungjawab berdasarkan standar dalam tugas yang telah ditetapkan. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil demikian sebaliknya. Hubungan antara lembaga terkait baik eksternal maupun internal serta masyarakat yang tidak kalah pentingnya menjadi penentu akan keberhasilan kebijakan retribusi parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan parkir berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tentu dihadapkan dengan adanya faktor penghambat. Berikut ini adalah Faktor penghambat yang muncul dalam proses pengimplementasian Kebijakan parkir berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan

a. Keterbatasan Jumlah SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

Abidin (2002:131-132) mengungkapkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan pengimplementasian sebuah kebijakan ikut ditentukan oleh faktor sumber daya. sumber daya disini yang dimaksudkan adalah ketersediaan akan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama dalam sebuah proses perencanaan, penyusunan strategi, hingga pada tahap implementasi. Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan Sumberdaya Manusia atau para pegawai yang memiliki kualitas serta tingkat pendidikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengalami keterbatasan dimana jumlah pegawai dengan lulusan sekolah menengah atas (SMA) lebih banyak. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan SDM yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dikarenakan oleh jumlah pegawai dinas justru lebih banyak dari pegawai dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 26 orang pegawai, lulusan S1 sebanyak 15 orang pegawai, serta yang berlatar belakang pendidikan S2 berjumlah 9 orang dari jumlah keseluruhan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yakni sebanyak 50 orang pegawai.

Salah hambatan dalam peningkatan kinerja dari dinas perhubungan kabupaten lamongan dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan adalah keterbatasan SDM dimana jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja dan banyaknya petugas juru parkir yang harus dikontrol. dilihat dari jumlah maupun tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Dishub lamongan perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun dari latar belakang pendidikan pegawai dalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan.

Keterbatasan dari jumlah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu faktor penentu didalam proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang mana jumlah pegawai dari lulusan SMA masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai Dishub dengan lulusan S1 maupun S2. Keterbatasan pada jumlah aparatur Dishub

Lamongan membuat kontrol akan keberlangsungan kebijakan parkir berlangganan tidak dapat dilakukan setiap saat maupun secara menyeluruh mengingat jumlah maupun kualitas dari aparaturnya Dishub Lamongan masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kemampuan.

UPT Manajemen dan Rekayasa Lalulintas (Menrek) pada Dinas Perhubungan dalam proses pengimplementasian kebijakan retribusi berlangganan merupakan salah satu sarana organisasi pendukung untuk membantu pelaksanaan peningkatan potensi PAD yang dikepalai oleh Bapak Tony Ariantoro, SAP.MM. Dalam penelitian ditemukan bahwa didalam menutupi kekurangan dari SDM dari aparaturnya Dishub agar mampu memonitoring pelaksanaan dari kebijakan parkir berlangganan, Dishub Lamongan dalam setiap tahun anggaran selalu mengadakan pelatihan maupun peningkatan kapasitas bagi setiap pegawainya baik ditingkat atas maupun hingga tingkat terendah yang tidak hanya dilakukan di daerah lamongan saja melainkan melalui kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan yang ada luar daerah Lamongan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas dari sumberdaya aparaturnya yang ada sekaligus sebagai bahan perbaikan dari kegiatan yang telah dijalankan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Setelah memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, bahwa sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam menggerakkan atau menjalankan sebuah kegiatan ataupun kebijakan yang fungsinya adalah menggerakkan setiap kegiatan didalam mendukung proses pengimplementasian kebijakan. Adanya hambatan terkait

dengan jumlah maupun kemampuan aparatur pada dinas perhubungan kabupaten lamongan tentu akan berpengaruh terhadap proses pengimplementasian Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang ingin dicapai didalam proses pengimplementasian dari kebijakan parkir berlangganan yakni meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) disetiap tahunnya dari sektor pajak yakni retribusi parkir kendaraan dapat tercapai secara efektif dan maksimal. tujuan kebijakan parkir berlangganan Kabupaten Lamongan dapat dilihat jelas bahwa tujuan utamanya adalah peningkatan pemasukan daerah dari upaya pengoptimalan penggalian sumber pemasukan yang besar dalam pengelolaan yang baik yaitu dengan cara menjalankan kebijakan parkir berlangganan karena dengan menjalankan kebijakan parkir berlangganan setiap wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya tiap tahunnya sudah juga termasuk membayar parkir berlangganan. Dengan sistem itulah pendapatan dari sektor retribusi parkir tidak terjadi kebocoran.

b. Kurangnya Kontrol dari Dinas Perhubungan terhadap para Petugas Juru Parkir

Proses pengawasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir merupakan hal yang paling penting sekali dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga mampu mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Brata (2003:407) menyatakan pengendalian meliputi: pemantauan, penilaian dan pelaporan. Pemantauan dan penilaian sering disebut monev, yaitu singkatan dari monitoring dan evaluasi. Hal ini pada akhirnya akan bermanfaat dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan. Petugas juru parkir

yang merupakan mata rantai komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dinilai oleh beberapa masyarakat lamongan seperti halnya yang diungkapkan oleh masyarakat Lamongan yang memanfaatkan jasa parkir berlangganan bahwa kurangnya kontrol dan pengawasan dari Dinas Perhubungan serta pihak kepolisian mengakibatkan praktek pungutan yang dilakukan oleh para petugas juru parkir masih tetap saja berlangsung dimana adanya beberapa titik parkir berlangganan yang para petugas juru parkir masih meminta uang retribusi parkir meskipun masyarakat telah menunjukkan karcis parkir berlangganan yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Lamongan.

Terkait dengan masih lemahnya kontrol dan pengawasan atas praktek pungutan liar diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tentang tentang Parkir berlangganan, Dinas mengakui bahwa hingga saat ini beliau telah mendapatkan laporan dan keluhan terkait dengan masih adanya beberapa petugas parkir yang melakukan pungutan parkir diluar dari ketentuan. Dians Pehubungan Kabupaten Lamongan hingga sejauh ini telah melaksanakan tugas secara maksimal namun keterbatasan jumlah pegawai pada dinas perhubungan yang bertugas untuk mengawasi para petugas juru parkir masih belum sebanding dengan jumlah petugas juru parkir yang ada. belum lagi jam kerja para pegawai dinas perhubungan yang tidak sama dengan jam kerja para petugas parkir yang mulai menjalankan kegiatan pengaturan parkir sejak pagi hari yakni pukul 07.00 hingga pukul 21.00 malam.

Terkait dengan kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan pengaturan parkir serta adanya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh para

petugas juru parkir terhadap para pengguna kendaraan bermotor yang memiliki karcis parkir berlangganan. Prakosa (2003:36) menjelaskan bahwa pengawasan atau pengendalian dalam pengelolaan parkir merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan dan penilaian (*evaluation*) untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Terkait dengan fenomena masih adanya adanya pungutan yang dilakukan oleh para petugas juru parkir terhadap masyarakat yang telah memiliki karcis parkir berlangganan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan serta *stakeholders* lain yang terlibat didalam implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tentang tentang Parkir berlangganan hanya sebatas agar pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan disetiap tahunnya tanpa memperhatikan dan memperbaiki sistem pengawasan serta kontrol terhadap para petugas pelaksana yang ada di tingkat bawah. Jika kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus, hal seperti ini tentu akan mengakibatkan kebocoran anggaran pendapatan dari sektor retribusi parkir kendaraan serta akan berdampak pada perlambatan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir yakni parkir berlangganan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 telah berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan asli daerah sebelum kebijakan retribusi parkir berlangganan diberlakukan, pendapatan dari sektor retribusi parkir hanya mencapai Rp 300.000.000,- per tahunnya, sedangkan sejak diberlakukan kebijakan parkir berlangganan kontribusi yang diperoleh dari retribusi parkir mengalami peningkatan hingga Rp 6.135.960.000 dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan selaku organisasi pelaksana kebijakan parkir berlangganan.
2. Proses pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir berlangganan tidak lepas juga dari adanya komunikasi yang baik dari setiap pemangku kebijakan didalamnya yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Pihak Satuan Lalulintas Polres Lamongan, Samsat Lamongan, masing-masing SKPD di Kabupaten Lamongan, para petugas jukir yang ditugaskan serta masyarakat Lamongan.
3. Sumberdaya Manusia yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan Retribusi Parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan tidak hanya melibatkan petugas dinas perhubungan melainkan juga melibatkan peran

dan fungsi dari para tenaga kontrak yang bertugas di 89 titik parkir serta adanya sumberdaya anggaran yang secara keseluruhannya bersumber dari APBD Lamongan.

4. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan didalam mendukung kebijakan Retribusi Parkir berlangganan yang ada di Kabupaten Lamongan saat ini masih masih belum berjalan dengan baik dimana masih terlihat adanya kegiatan pungutan uang parkir yang dilakukan oleh petugas juru parkir kepada setiap pengendara kendaraan meskipun para pemilik kendaraan telah menunjukan karcis parkir berlangganan. Selain itu, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh para petugas dinas perhubungan mengakibatkan masih adanya tindakan pungutan parkir oleh juru parkir bagi setiap pemilik kendaraan yang telah memiliki karcis parkir berlangganan.
5. Struktur birokrasi yang dibentuk dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan masih belum berjalan dengan baik. hal ini ditunjukan dengan masih leluasanya para petugas parkir melakukan pungutan liar terhadap para pengguna kendaraan yang telah memiliki karcis parkir berlangganan.
6. Faktor penghambat yang muncul dalam proses pengimplementasian Kebijakan parkir berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan yakni keterbatasan jumlah SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan serta Kurangnya kontrol dari Dinas Perhubungan terhadap para Petugas Juru Parkir.

B. Saran

1. Terkait dengan masalah kepuasan pengguna jasa parkir berlangganan, seharusnya bisa menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah yakni melalui Dinas Perhubungan serta jajaran SKPD terkait untuk memonitoring kembali juru parkir yang masih meminta bayar ketika pengguna jasa parkir berlangganan melakukan parkir di lokasi dan titik parkir berlangganan dan juga Dinas Perhubungan harus berani memberikan tindakan tegas kepada para petugas juru parkir yang melakukan pungutan liar.
2. Untuk mendukung keberlanjutan dari Implementasi parkir berlangganan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam melakukan penerimaan pegawai harus mempertimbangkan latar belakang tingkat pendidikan, usia serta bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan betul-betul memiliki kemampuan sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Dalam mengimplementasikan kebijakan parkir berlangganan, Dinas Perhubungan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan PAD saja melainkan juga harus memperhatikan kepuasan masyarakat dari adanya pengimplementasian kebijakan parkir berlangganan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan evaluasi secara rutin dimana masyarakat sebagai sasaran dari implementasi kebijakan parkir berlangganan ikut dilibatkan didalam kegiatan evaluasi tersebut.
4. Perlu adanya penguatan komunikasi didalam proses pengimplementasian kebijakan parkir berbayar oleh setiap pihak yang

terlibat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya tindakan-tindakan diluar dari prosedur yang dilakukan oleh para petugas juru parkir didalam menjalankan kegiatan parkir sehingga dalam hal kepuasan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah lamongan dapat tercapai secara efektif.

5. Sebagai upaya peningkatan pengawasan dan kontrol, Dinas perhubungan seharusnya mampu melibatkan peran dari masyarakat dalam melakukan kontrol. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kontak saran ataupun membuka layanan pengaduan yang dapat diakses melalui nomor hp ataupun melalui aplikasi pesan online (*Line* atau *W'A*) sebagai sarana penyampaian keluhan dari implementasi kebijakan parkir berlangganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Suara Bebas.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung
- Brata, dan Trihartanto. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Brata, 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Dunn, William, N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Gray Widya.
- Islamy, M. Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukhlis, Imam And Timbul Hamonongan Simanjutak, 2011. *Simposiom Nasional Perpajakan: Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. Madura : Universitas Trunojoyo.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Margono, Bambang. dkk. 2003. *Kewarganegaraan SLTP 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitin Kualitatif Cet. Ke-30*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Formulasi, Impleementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant.2009, *Public Policy*, PT Elex Media komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*Edisi Ketiga, Revisi 2011. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- PERDA Kabupaten Lamongan No. 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- Prakosa, B Kesit, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah, Jogyaakarta : UII Press.
- Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*. Malang: Yayasan Asah-Asih-asuh
- Siahaan, P. Marihot. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Petra
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Wahab, Abdul Sholichin. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Pertama*. Jakarta: Bumi aksara.
- Wahab, Abdul Sholichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. Sekeloa Timur 181, Malang 65145, Indonesia
Telp : +62-341-594777, 594778, 594779 Fax : +62-341-594121
Email : info@unibraw.ac.id keuangan@unibraw.ac.id

Survei : 2002 / UNIBRAW / 11.11 / 192017
Lampiran :
Hal : Riset Survey

Kepada : Yth. Kepala Kesbangpol dan Linmas
Kabupaten Lamongan

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :


Nama : MOHAMMAD SABILLILAH
Alamat : Jl. Watu Gilang no 488a Kota Malang
NIM : 135030501111003
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Administrasi Pemerintahan
Tema : Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Studi Implementasi Perda No.15 tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan)

Lamanya : ± 2 Bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 7 Juni 2017

Mengetahui,
an. Dekan
Koordinator Adm. Pemerintahan


Dr. Drs. Laksana Hakim, M. Sc
NID. 19540801 198701 1 001

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/378/413.207/2017

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 07 Juni 2017 Nomor : 7902/UN10.F03.11.11/PM/2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- | | |
|------------------------|---|
| a. Nama | : MOHAMMAD SABILILLAH |
| b. NIK/NIM | : 3524222501950001 |
| c. Alamat | : Gg. Sawahan IV/4 RT 003 RW 003 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan Kab. Lamongan |
| d. Pekerjaan/Jabatan | : Mahasiswa |
| e. Instansi/Organisasi | : Universitas Brawijaya Malang |
| f. Kebangsaan | : Indonesia |

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Judul Proposal/Kegiatan | : Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Implementasi Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Lamongan) |
| b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan | : Penyusunan Skripsi |
| c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan | : Ilmu Administrasi |
| d. Penanggungjawab | : MOHAMMAD SABILILLAH |
| e. Anggota/Peserta | : - |
| f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan | : 14 Juni s/d 31 Agustus 2017 |
| g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan | : 1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
2. Dinas Perhubungan Kab. Lamongan |

Dengan ketentuan :

- Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
- Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
- Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 13 Juni 2017

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,


M. RO'IS, SH., M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19710615 200312 1 007

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Lampiran 3. Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto 39 Lamongan Kode Pos : 62251
Telp. (0322) 321987, Fax. (0322) 316330 E-mail : dishub@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 03 Agustus 2017

Nomor : 050/833/413.110/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Melakukan Penelitian

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Mahasiswa dibawah ini telah selesai melakukan penelitian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

- | | |
|------------------------|--|
| a) Nama | : MOHAMMAD SABILILLAH |
| b) NIK/NIM | : 3524222501950001 |
| c) Alamat | : Gg. Sawahan IV/4 RT 003 RW 003 Kel.
Sukomulyo Kec. Lamongan Kab. Lamongan |
| d) Pekerjaan/Jabatan | : Mahasiswa |
| e) Instansi/Organisasi | : Universitas Brawijaya Malang |
| f) Kebangsaan | : Indonesia |

Telah melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) Judul Proposal/Kegiatan | : Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) (Studi Implementasi Perda No.15 Tahun
2012 Tentang Retribusi Parkir Berlangganan di
Kabupaten Lamongan) |
| b) Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan | : Penyusunan Skripsi |
| c) Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan | : Ilmu Administrasi |
| d) Penanggungjawab | : MOHAMMAD SABILILLAH |
| e) Anggota/Peserta | : - |
| f) Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan | : 14 Juni s/d 31 Agustus 2017 |
| g) Lokasi Penelitian Survey/Kegiatan | : 1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan
2. Dinas Perhubungan Kab. Lamongan |

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASI MANAJEMEN DAN REKAYASA
ALU LINTAS

TONY ARIANTORO, SAP, MM
Penata
NIP. 19780129 200112 1001

Lampiran 4.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan



Wawancara dengan para petugas parkir di Kabupaten Lamongan



Bentuk karcis parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan



Bentuk karcis parkir non berlangganan untuk kendaraan non wilayah Kabupaten Lamongan



Pemasangan Banner Sosialisasi Parkir Berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan